



RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR POM DI BANJARBARU

TAHUN 2025-2029



085245004884



@Bbpom banjarmasin



@bpombanjarbaru



@bpom.banjarbaru



bpombanjarbaru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU
NOMOR HK.02.02.17A.12.25.258 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU TAHUN 2025-2029**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal : 5 Desember 2025

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANJARBARU



ARY YUSTANTININGSIH



**RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU
TAHUN 2025-2029**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU
NOMOR HK.02.02.17A.12.25.258 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen Rancangan Strategis Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini menjadi pedoman dan kompas strategis dalam upaya mewujudkan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah Kalimantan Selatan.

Rancangan Strategis ini disusun untuk mendukung pencapaian Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029, serta berkontribusi terhadap agenda pembangunan kesehatan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya peningkatan ketahanan kesehatan, daya saing produk pangan dan obat dalam negeri, serta perlindungan masyarakat. Penyelarasan kebijakan ini merupakan wujud komitmen Balai Besar POM di Banjarbaru dalam menghadirkan tata kelola World Class Regulation, transformasi tata kelola layanan publik, dan birokrasi yang berorientasi hasil.

Periode 2025–2029 menjadi momentum penting untuk memperkuat Transformasi Digital Pengawasan Obat dan Makanan, melalui penguatan integrasi data dan sistem informasi, pemanfaatan analitik prediktif berbasis risiko, serta penerapan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan dan respons cepat berbasis bukti. Selain itu, Rancangan Strategis ini menempatkan penguatan Early Warning System (EWS) sebagai strategi utama untuk mendorong pengawasan yang semakin proaktif, preventif, dan responsif dalam menghadapi dinamika risiko produk, rantai pasok, dan konsumsi masyarakat.

Seluruh arah kebijakan, sasaran, dan strategi tidak lepas dari penguatan *Core Values* ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai budaya kerja utama di lingkungan Balai Besar POM di Banjarbaru. Implementasi nilai ini menjadi

fondasi perilaku organisasi dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan program, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Semangat Employer Branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” mengokohkan tekad seluruh jajaran dalam memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga kesehatan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan masukan konstruktif dalam penyusunan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa tantangan pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan semakin kompleks seiring percepatan digitalisasi, inovasi produk, dinamika pasar global, serta meningkatnya risiko keamanan produk. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Rancangan Strategis ini memerlukan komitmen seluruh jajaran BBPOM di Banjarbaru untuk bekerja secara profesional, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhirnya, melalui Rancangan Strategis 2025–2029 ini, kami bertekad untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan Obat dan Makanan yang unggul, responsif, inovatif, digital, dan berstandar dunia, demi terwujudnya masyarakat Kalimantan Selatan yang semakin sehat dan produktif. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat, Petunjuk, dan Kekuatan kepada kita dalam menjalankan pengabdian mulia ini.

Banjarbaru, 5 Desember 2025

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANJARBARU



ARY YUSTANTININGSIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2020-2024.....	6
1.1.2 Aspirasi/Ekspektasi Stakeholder	36
1.2 Potensi Permasalahan.....	41
1.2.1 Kekuatan (<i>Strength</i>).....	42
1.2.2 Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	51
1.2.3 Peluang (<i>Opportunity</i>).....	58
1.2.4 Ancaman (<i>Threat</i>).....	66
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	75
2.1 Visi.....	75
2.2 Misi.....	76
2.3 Tujuan	80
2.4 Sasaran Kegiatan.....	83
2.4.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83
2.4.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	84
2.4.3 Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya efektivitas KIE.....	85
2.4.4 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	85
2.4.5 Sasaran Kegiatan 5 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.....	86
2.4.6 Sasaran Kegiatan 6 : Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.....	86

2.4.7	Sasaran Kegiatan 7 : Layanan Publik UPT yang prima	87
2.4.8	Sasaran Kegiatan 8 : Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.....	87
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI		123
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM	123
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Banjarbaru.....	128
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....		137
4.1	Target Kinerja	137
4.2	Kerangka Pendanaan	144
BAB V PENUTUP		145
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025-2029		147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Pembagian Wilayah Kerja UPT BPOM di Provinsi Kalimantan Selatan	2
Gambar 1. 2. Struktur Organisasi BBPOM di Banjarbaru	5
Gambar 1. 3. Nilai Kinerja (NPSS) BBPOM di Banjarbaru Tahun 2020 - 2024	17
Gambar 1. 4. Tren Capaian Kinerja SK1 tahun 2020-2024.....	18
Gambar 1. 5. Tren Capaian Kinerja SK2 tahun 2020-2024.....	20
Gambar 1. 6. Tren Capaian Kinerja SK3 tahun 2020-2024.....	21
Gambar 1. 7. Tren Capaian Kinerja SK4 tahun 2020-2024.....	24
Gambar 1. 8. Tren Capaian Kinerja SK5 tahun 2020-2024.....	25
Gambar 1. 9. Tren Capaian Kinerja SK6 tahun 2020-2024.....	26
Gambar 1. 10. Tren Capaian Kinerja SK7 tahun 2020-2024.....	28
Gambar 1. 11. Tren Capaian Kinerja SK8 tahun 2020-2024.....	30
Gambar 1. 12. Tren Capaian Kinerja SK9 tahun 2020-2024.....	32
Gambar 1. 13. Tren Capaian Kinerja SK10 tahun 2020-2024	34
Gambar 1. 14. Tren Capaian Kinerja SK11 tahun 2020-2024	35
Gambar 1. 15. Nilai SKM BBPOM di Banjarbaru Tahun 2020 - 2024.....	39
Gambar 1. 16. Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.....	40
Gambar 1. 17. Indeks RB BBPOM di Banjarbaru tahun 2020-2024.....	46
Gambar 1. 18. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis jabatan.....	48
Gambar 1. 19. Jumlah Pegawai Teknis yang Mengikuti Ujian Kompetensi .	49
Gambar 1. 20. Profil Jumlah Fasyankes Pelapor Farmakovigilans di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2024.....	57
 Gambar 2. 1. Misi Presiden (Asta Cita)	 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Realisasi Indikator RPJMN Terkait BBPOM di Banjarbaru.....	7
Tabel 1. 2. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2020-2024	8
Tabel 1. 3. Jumlah Pegawai BBPOM di Banjarbaru Per Jabatan Fungsional	47
Tabel 1. 4. Matriks Ringkasan Analisis SWOT	72
Tabel 2. 1. Indikator Tujuan Badan POM dan Target Tahun 2025-2029.....	82
Tabel 2. 2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Banjarbaru periode 2025-2029	88
Tabel 2. 3. Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Kegoatan BBPOM di Banjarbaru Tahun 2025-2029	95
Tabel 3. 1. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029	126
Tabel 3. 2. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Banjarbaru 2025-2029	130
Tabel 4. 1. Target Kinerja BBPOM di Banjarbaru Tahun 2025-2029	138
Tabel 4. 2. Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Program	144
Tabel 4. 3. Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana.....	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional sekaligus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

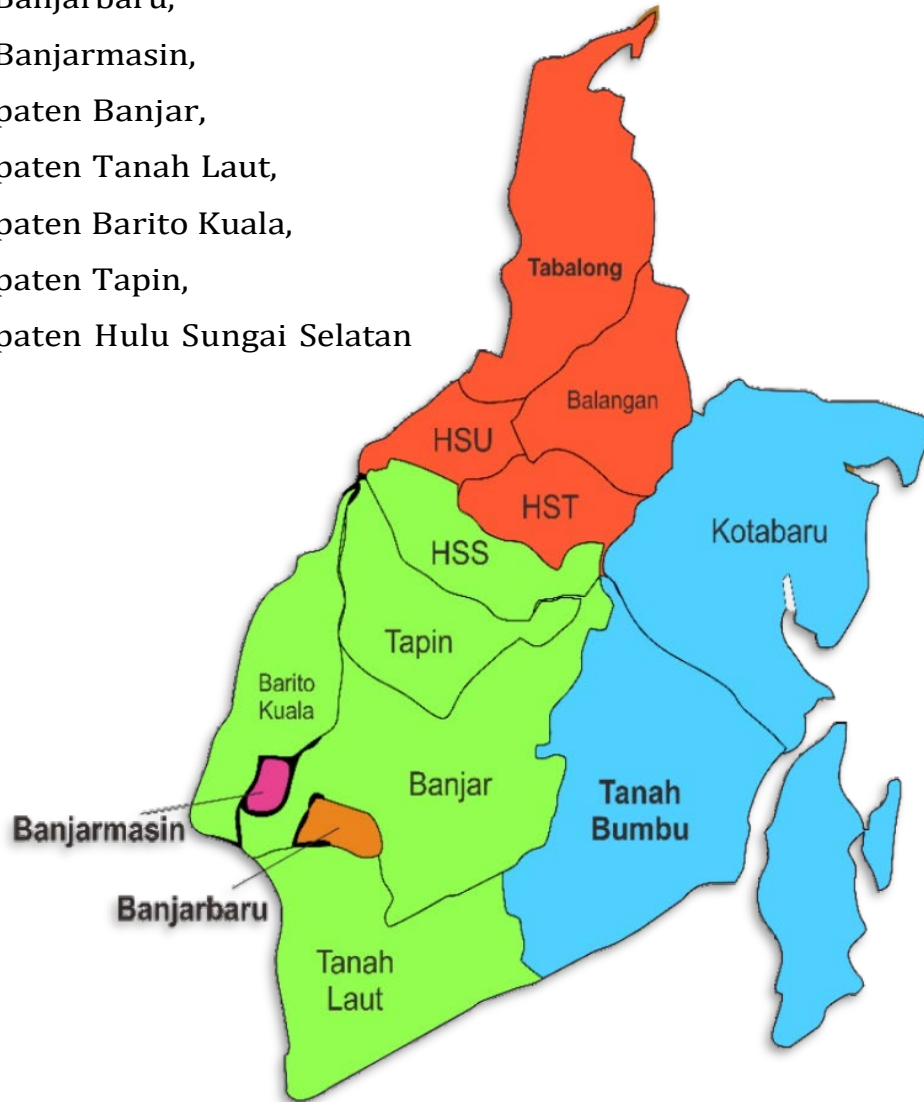
Balai Besar POM di Banjarbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, dimana tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39).

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tersebut selain menetapkan perubahan nomenklatur Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi Balai Besar POM di Banjarbaru, dalam rangka penyesuaian dengan tempat kedudukan kantor yang baru, yang beralamat di Jalan Bina Praja Utara, Komplek Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, juga mengatur wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru,



Adapun wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru sebanyak 7 (tujuh) dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

- 1) Kota Banjarbaru,
- 2) Kota Banjarmasin,
- 3) Kabupaten Banjar,
- 4) Kabupaten Tanah Laut,
- 5) Kabupaten Barito Kuala,
- 6) Kabupaten Tapin,
- 7) Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Gambar 1. 1. Pembagian Wilayah Kerja UPT BPOM di Provinsi Kalimantan Selatan

Sedangkan dari 6 (enam) kabupaten lainnya, 4 (empat) kabupaten menjadi wilayah kerja Balai POM di Tabalong, yaitu :

- 1) Kabupaten Tabalong,
- 2) Kabupaten Balangan,
- 3) Kabupaten Hulu Sungai Utara,
- 4) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

dan 2 (dua) kabupaten menjadi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

- 1) Kabupaten Tanah Bumbu
- 2) Kabupaten Kotabaru

Tugas pokok Balai Besar POM di Banjarbaru selaku UPT BPOM adalah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Balai Besar POM di Banjarbaru selaku UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Banjarbaru bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.



Susunan Organisasi Balai Besar POM, terdiri atas :

a) Kepala;

b) Bagian Tata Usaha;

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

c) Kelompok Jabatan Fungsional

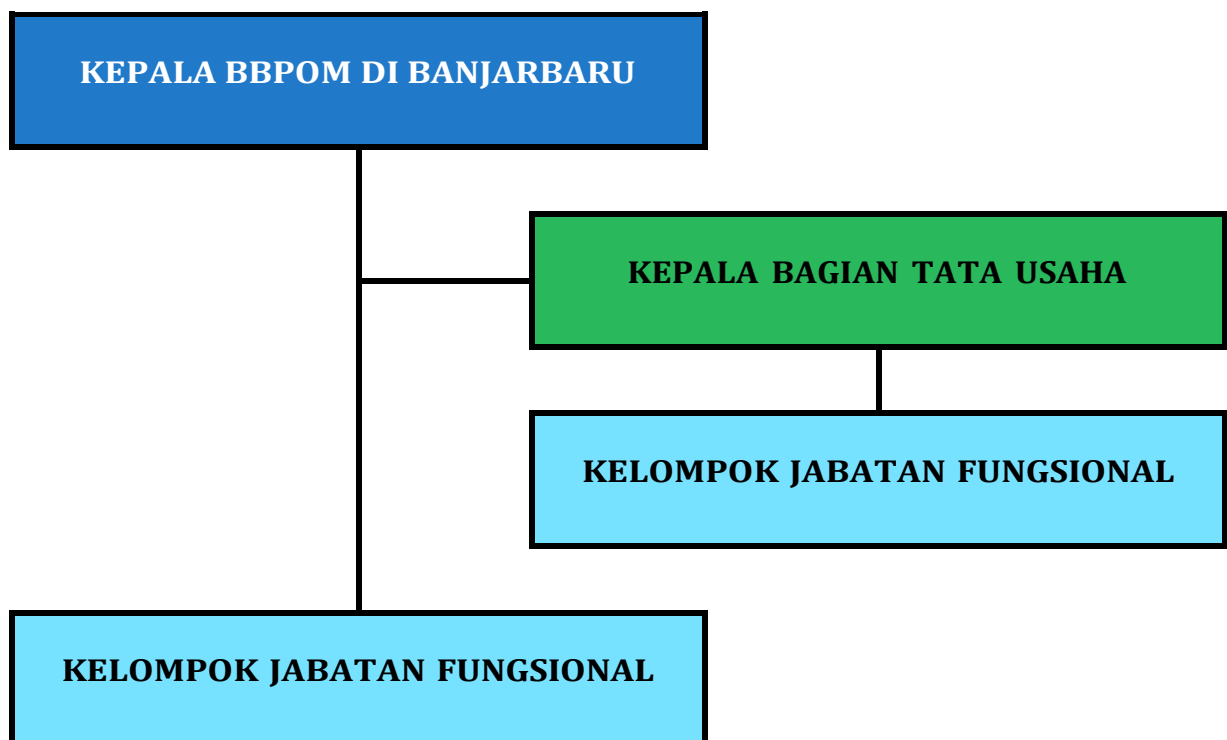
Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.



Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Besar POM :



Gambar 1. 2. Struktur Organisasi BBPOM di Banjarbaru

Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025–2029, merupakan turunan langsung dari Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, K/L wajib menyusun Renstra K/L yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi (K/L) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, disusun sebagai pedoman dan arah dalam



penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Banjarbaru di wilayah kerjanya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan panduan bagi pimpinan Unit Organisasi/Satker dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Selain itu, Renstra disusun untuk menjadi acuan dalam proses evaluasi kinerja Unit Organisasi/Satker dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Adapun tujuan dilakukannya evaluasi pelaksanaan Renstra adalah untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.

Sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Banjarbaru untuk periode 2025-2029 dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri Obat dan Makanan sehingga Balai Besar POM di Banjarbaru tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di wilayah kerjanya di Kalimantan Selatan. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai Besar POM di Banjarbaru bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat di wilayah kerjanya di Kalimantan Selatan memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.1.1 Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2020-2024

Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator RPJMN terkait BPOM yaitu: (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; dan (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, maka Balai Besar POM di Banjarbaru selaku UPT BPOM juga memiliki kedua indikator tersebut, yang



diukur berdasarkan tools pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh BPOM dengan hasil selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

*Tabel 1. 1. Realisasi Indikator RPJMN Terkait BBPOM di Banjarbaru
Tahun 2020-2024*

Uraian	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	T	80,8	82	83	84	94,9
	R	78,05	78	87	95	94,12
	%	96,60	95,12	104,82	113,10	99,18
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	T	78	80	81	82	95,1
	R	81,54	85	92	94	88,62
	%	104,54	106,25	113,58	114,63	93,19

Sumber : Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2020-2024

Realisasi indikator **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat** dari tahun 2020-2024 berfluktuasi yaitu 78,05% di tahun 2020; 78% di tahun 2021; 87% di tahun 2022; 95% di tahun 2023; dan 94,12% di tahun 2024, dimana pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi indikator **Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat** selama tahun 2020-2023 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 81,54% di tahun 2020; 85% di tahun 2021; 92% di tahun 2022; 94% di 2023. Sedangkan tahun 2024 realisasinya 88,62 dan tidak mencapai tarhet.

Tidak tercapainya target kedua indikator ini di tahun 2024 disebabkan peningkatan target yang tinggi menyesuaikan dengan realisasi di tahun 2023, dan terdapat perubahan cara perhitungan dalam manual indikatornya.

Dalam kaitannya dengan implementasi pengarusutamaan gender, selama tahun 2020- 2024, nilai anggaran yang diberi penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) terus mengalami penguatan, yakni Rp 1.450.000.000 (2020), Rp 1.582.729.000 (2021), Rp 1.763.898.000 (2022), Rp 1.990.127.000 (2023), dan Rp 2.078.199.000 (2024). Komitmen implementasi terus dibangun seiring dengan penguatan kesadaran sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan.



Tabel 1. 2. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2020-2024

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	78,05	96,60	82	78	95,12	83	87	104,82	84	95	113,10	94,9	94,12	99,18
IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	81,54	104,54	80	85	106,25	81	92	113,58	82	94	114,63	95,1	88,62	93,19
IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	68,77	73,16	70	76	108,57	72	86	119,44	74	93	125,68	92,5	90,4	97,73
IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	79,46	93,48	86	89	103,49	86	90	104,65	87	87	100,00	86,9	88,24	101,54

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	92	91	98,91	93	99	106,45	94	94,12	100,13	96,6	94,19	97,51
SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKSK 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	81,64	93,84	82	92,4	112,68	83	84,33	101,60	85	99,87	117,49	99,9	100	100,10
IKSK 7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	53,52	97,31	60	71,79	119,65	62	63,47	102,37	65	77,03	118,51	77,1	91,19	118,27

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	99,81	121,72	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
IKSK 9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	36,59	182,95	45	51	113,33	50	56	112,00	55	66	120,00	66	66,12	100,18
IKSK 10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	59,96	109,02	63	69	109,52	66	65	98,48	68	68	100,00	71	71,22	100,31
IKSK 11	Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,69	118,65	3,91	3,98	101,79	4,01	4,49	111,97	4,25	4,54	106,82	4,6	4,75	103,26

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 12	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	0,00	77	83,56	108,52	79	95,24	120,56	94	100	106,38
IKSK 13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	95	99,38	104,61

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKSK 14	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,73	89,9	107,37	90	92,51	102,79	91,8	95,35	103,87	93,6	95,68	102,22	96,5	96,88	100,39
IKSK 15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100,00	40	40	100,00	60	60	100,00	80	80	100,00	100	100	100,00
IKSK 16	Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00	12	12	100,00	19	19	100,00	25	25	100,00	32	33	103,13
IKSK 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	2	100,00	4	4	100,00	6	6	100,00	8	8	100,00	10	10	100,00
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKSK 18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	97,27	108,08	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00

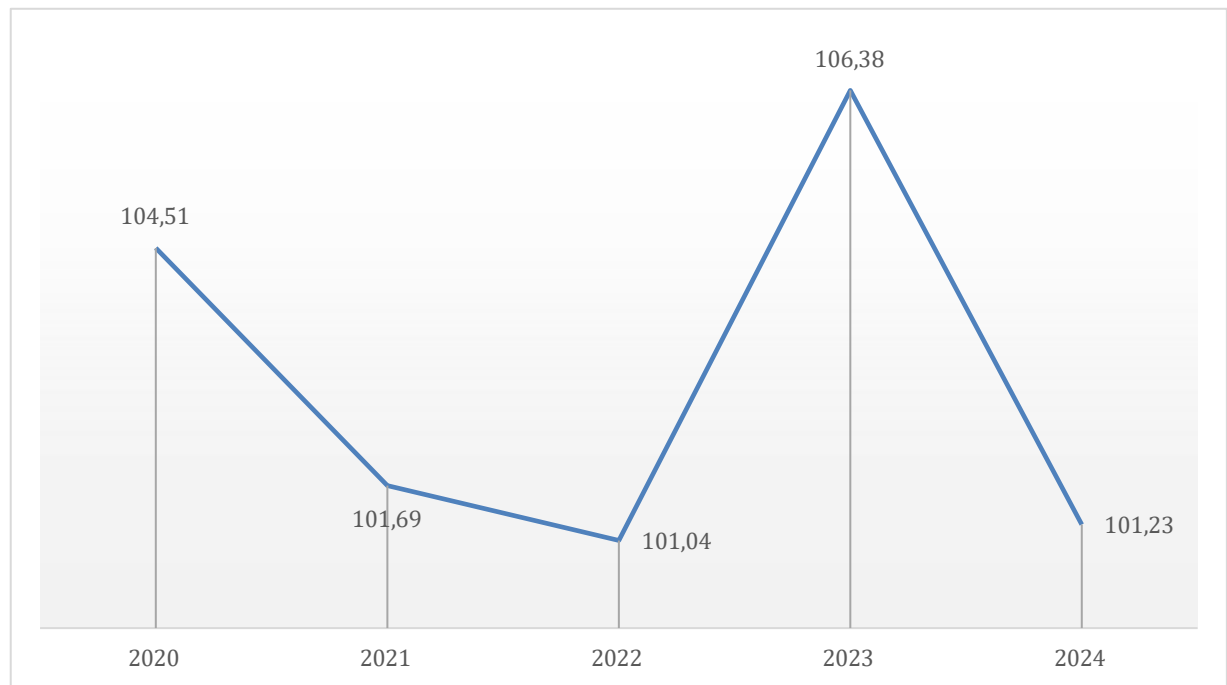
IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	96,41	107,12	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKSK 20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	89,69	110,73	90	95,53	106,14	92	71,88	78,13	94	100	106,38	96	100	104,17
SK 6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	67,2	88,42	73	73,4	100,55	78	82,2	105,38	83	80,6	97,11	81,32	83,39	102,55
IKSK 22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	1,82	120,53	2	2,025	101,25	2,25	2,9	128,89	2,5	3	120,00	3	3	100,00

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan															
IKSK 23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	78,36	115,24	81	79,08	97,63	84	83,04	98,86	86	84,48	98,23	89	86,69	97,40
SK 8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	96,35	112,03	91,1	92,3	101,32	92,3	98,1	106,28	93,4	98,6	105,57	98,7	99,82	101,13
IKSK 25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	76,11	105,71	78,33	73,33	93,62	80,56	73,72	91,51	82,78	75,91	91,70	85,01	80,11	94,24

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 26	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	88,5	89,18	100,77	90	91,83	102,03	91	94,28	103,60	91,5	94,99	103,81	96	97,33	101,39
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal															
IKSK 27	Indeks RB UPT	85	74,08	87,15	80,8	80,78	99,98	83,3	93,73	112,52	85,8	92,26	107,53	93,26	92,44	99,12
IKSK 28	Nilai AKIP UPT	80	76,14	95,18	78,1	76,14	97,49	80,1	78,65	98,19	82,1	79,16	96,42	81,13	81,03	99,88
IKSK 29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,21	91,89	109,12
SK10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
IKSK 30	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	80,16	106,88	81	83,09	102,58	82	84,96	103,61	83	89,33	107,63	90,42	87	96,22

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel															
IKSK 31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	90,96	97,81	92,5	89,87	97,16	93,1	88,24	94,78	94,3	89,24	94,63	91,06	97,43	107,00
IKSK 32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,64	100	104,56
IKSK 33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	98,62	106,04
IKSK 34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,22	76,09	124,29

Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Banjarbaru selalu berupaya untuk mempertahankan dan memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 (naik 5,34 poin). Meskipun pada tahun terakhir, tahun 2024 mengalami penurunan 5,15 poin, yang disebabkan target indikator kinerja tahun 2024 yang meningkat tajam, menyesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang cukup tinggi, sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak setinggi tahun 2023.



Gambar 1. 3. Nilai Kinerja (NPSS) BBPOM di Banjarbaru Tahun 2020 - 2024

Pengukuran kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarbaru.

Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

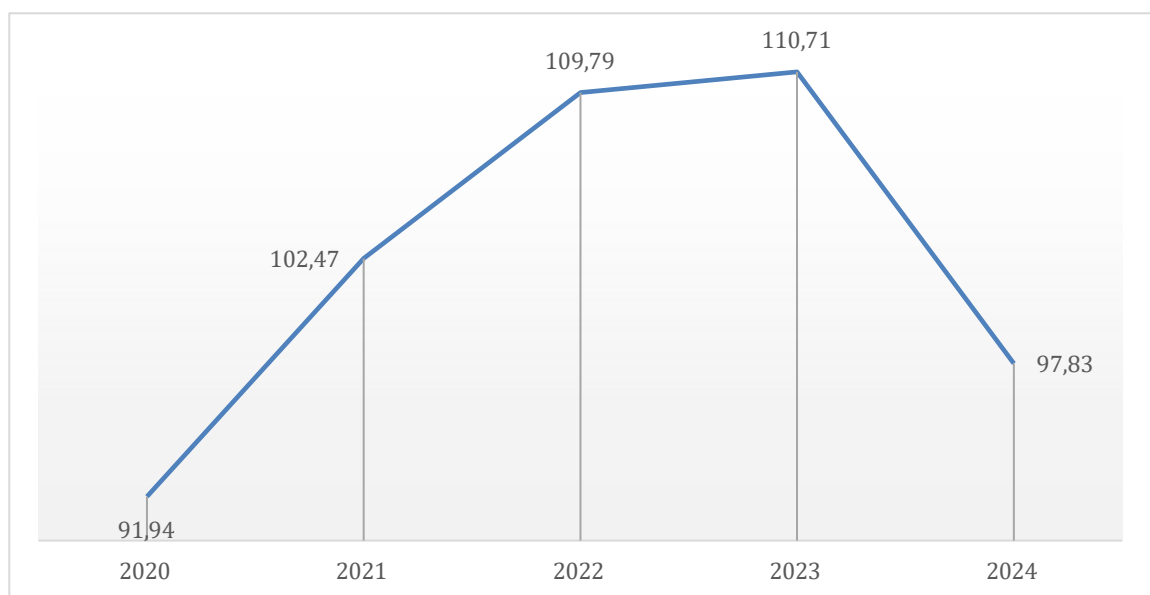


1) Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Banjarbaru merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : Audit (pre-market evaluation), Pengawasan setelah beredar (post-market control), Pengujian laboratorium, dan Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berikut ini grafik Tren Capaian Kinerja SK1 Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2020-2024.



Gambar 1. 4. Tren Capaian Kinerja SK1 tahun 2020-2024

Grafik ini menggambarkan perjalanan Balai Besar POM di Banjarbaru dalam mewujudkan SK1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru . Data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tantangan yang dinamis yang terlihat sejak awal periode renstra tahun 2020 dengan capaian yang diperoleh sebesar 91,94%. Capaian ini berfluktuasi dengan peningkatan tajam di tahun 2021 menjadi 102,47% dan 2022 menjadi 109,79% dan puncaknya tahun 2023 110,71%. Sedangkan nilai di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 97,83 %. Hal ini menekankan kompleksitas dan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap berbagai aspek, mulai dari persentase obat dan makanan yang

memenuhi syarat hingga jaminan keamanan dan mutu berdasarkan hasil pengawasan.

Capaian Kinerja SK1, merupakan rata-rata dari capaian kinerja 5 (lima) indikator kinerja yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut :

- a) Persentase Obat yang memenuhi syarat;
- b) Persentase Makanan yang memenuhi syarat;
- c) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;
- d) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan,
- e) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan realisasi indikator pada sasaran strategis pertama agar dapat mencapai target antara lain:

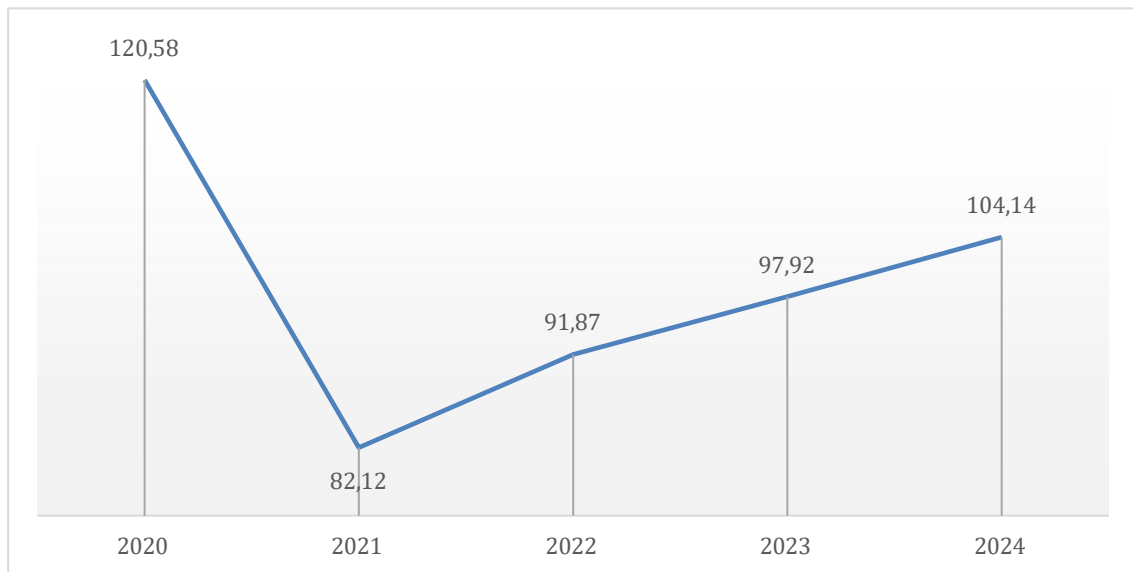
- ✓ Mengintensifikan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan menggalang komitmen untuk mengawal pelaksanaan DAN Non Fisik POM sehingga pengawasan obat dan makanan bisa berjalan lebih efektif.
- ✓ Meningkatkan kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan industri rumah tangga, baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi
- ✓ Mengoptimalkan peran petugas penyuluh pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan District Food Inspector/DFI dalam melakukan pembinaan/pengawasan pangan produk PRTP di daerah.

2) Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT

SK2 memiliki tren peningkatan capaian kinerja, tergambar sebagai berikut :





Gambar 1. 5. Tren Capaian Kinerja SK2 tahun 2020-2024

Pada SK2, Tren Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar POM di Banjarbaru dari Tahun 2020 hingga 2024, mengalami perubahan yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai efektivitas tercatat 120,58% kemudian menurun sangat signifikan menjadi 82,12% pada tahun 2021. Lalu pada tahun 2022 meningkat menjadi 91,87%, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 97,92% dan 104,14% pada tahun 2024.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar Balai Besar POM di Banjarbaru mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan, akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Banjarbaru mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 8 (delapan) Indikator Kinerja yaitu :

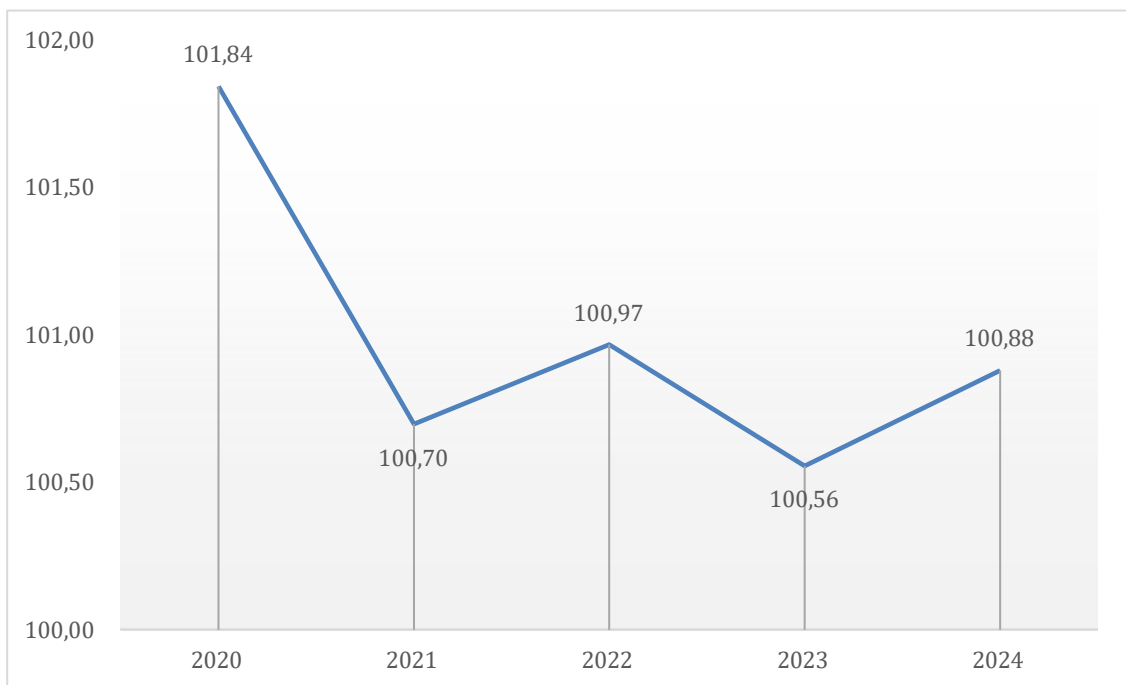
- a) Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan,
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan,

- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu,
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,
- f) Indeks Pelayanan Publik,
- g) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik,
- h) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

3) Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Hasil capaian kinerja SK3 Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2020-2024 ini digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 1. 6. Tren Capaian Kinerja SK3 tahun 2020-2024



Grafik ini secara langsung mencerminkan pencapaian SK3 dari Balai Besar POM di Banjarbaru. Tren peningkatan capaian nilai efektivitas KIE selama lima tahun terakhir menampilkan tahun 2020 sebagai awal periode Renstra tahun 2020-2024, dimana capaian nilai efektivitas KIE tercatat sebesar 101,84. Kemudian, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, terjadi sedikit penurunan nilai menjadi 100,70. Namun, mulai tahun 2022, grafik menunjukkan adanya tren peningkatan kembali. Capaian nilai efektivitas KIE tercatat sebesar 100,97 di tahun 2022, yang kemudian kembali menurun menjadi 100,56 di tahun 2023. Pada tahun 2024, Kembali meningkat mencapai 100,88. Pencapaian dan dinamika yang terlihat pada grafik ini merupakan hasil dari beragam inisiatif dan program KIE yang dijalankan oleh Balai Besar POM di Banjarbaru.

Mengemban misi BPOM untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan keamanan produk yang beredar, Balai Besar POM di Banjarbaru secara konsisten melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Kegiatan KIE ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Pada SK3 terdapat 4 indikator :

- a) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
- b) Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
- c) Jumlah Desa Pangan Aman
- d) Jumlah Pasar Aman berbasis Komunitas

Keberhasilan SK3 ini didukung oleh pengawalan dan evaluasi dari empat indikator kunci yang secara kolektif mencerminkan jangkauan dan kedalaman upaya KIE Balai Besar POM di Banjarbaru dalam membangun ekosistem keamanan pangan dari berbagai lini. Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarbaru untuk meningkatkan efektivitas KIE obat dan makanan diantaranya :

- Menjalin kerjasama dengan berbagai media lokal yang ada, antara lain dengan aktif melakukan penyebaran informasi melalui peliputan dan publikasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarbaru.
- Menjalin kerjasama dengan Universitas yang ada di kota Banjarbaru seperti Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dengan melibatkan dan memberdayakan mahasiswa sebagai duta dan fasilitator dalam hal penyebaran informasi terkait obat makanan. Pada tahun 2020-2024, Balai Besar POM di Banjarbaru telah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan seperti Pemilihan Duta Kosmetik, KIE di area Pameran, CFD dan kegiatan lainnya dalam rangka penyebaran informasi terkait obat dan makanan.

KIE tidak hanya dilakukan secara luring/tatap muka tapi juga secara kontinyu dan berkala dilakukan melalui seluruh platform yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Banjarbaru. Selain itu, juga merancang inovasi terkait ragam KIE baik secara kuantitas dan kualitas sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi yang diberikan terkait obat dan makanan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat sehingga mampu melindungi diri sendiri dari obat dan makanan

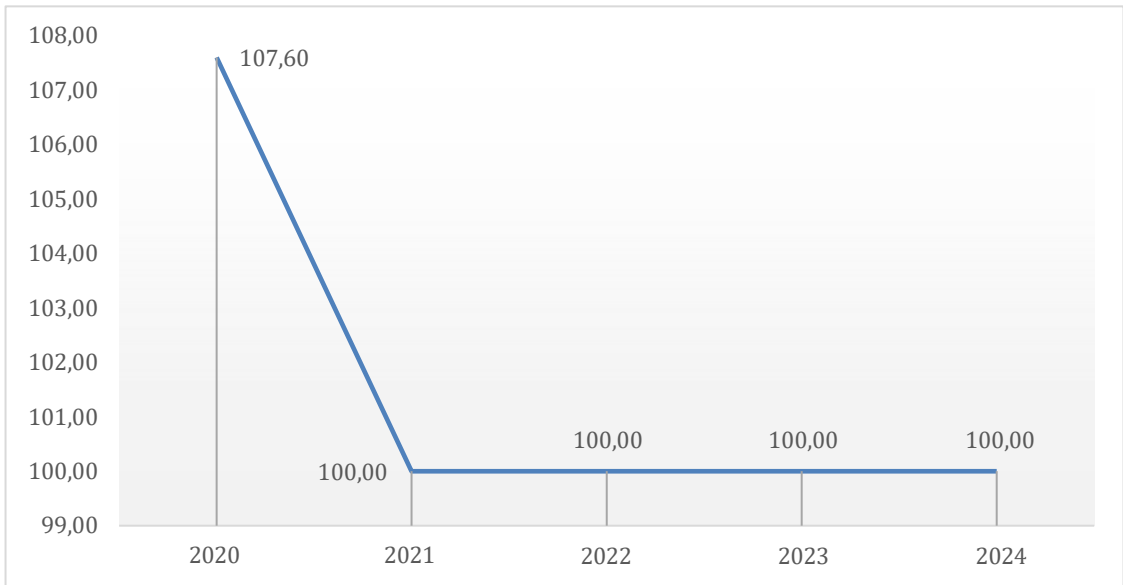
4) Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Balai Besar POM di Banjarbaru secara berkelanjutan mengoptimalkan proses pemeriksaan dan pengujian produk obat dan makanan. Efektivitas dari kegiatan ini menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan kepatuhan produsen terhadap standar yang ditetapkan, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik.

Tren Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru dari Tahun 2020 hingga 2024 secara langsung dapat terlihat dari grafik berikut :





Gambar 1. 7. Tren Capaian Kinerja SK4 tahun 2020-2024

Pada awal periode renstra di tahun 2020, nilai efektivitas tercatat sangat tinggi, yaitu 107,60 %. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 hingga 2024 nilainya menurun menjadi 100%. Hal ini disebabkan perubahan manual indikator kinerja yang menyebabkan nilai tertinggi adalah 100% dan kedua indikator sasaran kinerja ini memperoleh nilai maksimal tersebut. Pencapaian dan pergerakan yang terlihat pada grafik ini merupakan hasil dari fokus Balai Besar POM di Banjarbaru dalam memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan dan pengujian produk obat dan makanan dilakukan dengan standar yang ketat dan efisien.

Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, sasaran kinerja ini didukung oleh 2 (dua) indikator yang memperoleh capaian kinerja sangat baik, yaitu :

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- b) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sampling adalah melalui pembelian dan pemilihan sampel sesuai pedoman sampling, serta penilaian penandaan sesuai ketentuan. Sedangkan upaya yang dilakukan di laboratorium pengujian dalam rangka mengawal pencapaian target adalah perencanaan sampling dan pengujian dan melakukan monitoring, sehingga proses pengujian dapat berjalan lancar.

Apabila kondisi peralatan dalam keadaan siap dan ketersediaan bahan habis pakai sudah lengkap, maka pengujian dapat dilakukan sesuai dengan standar ruang lingkup parameter uji dan timeline pengujian.

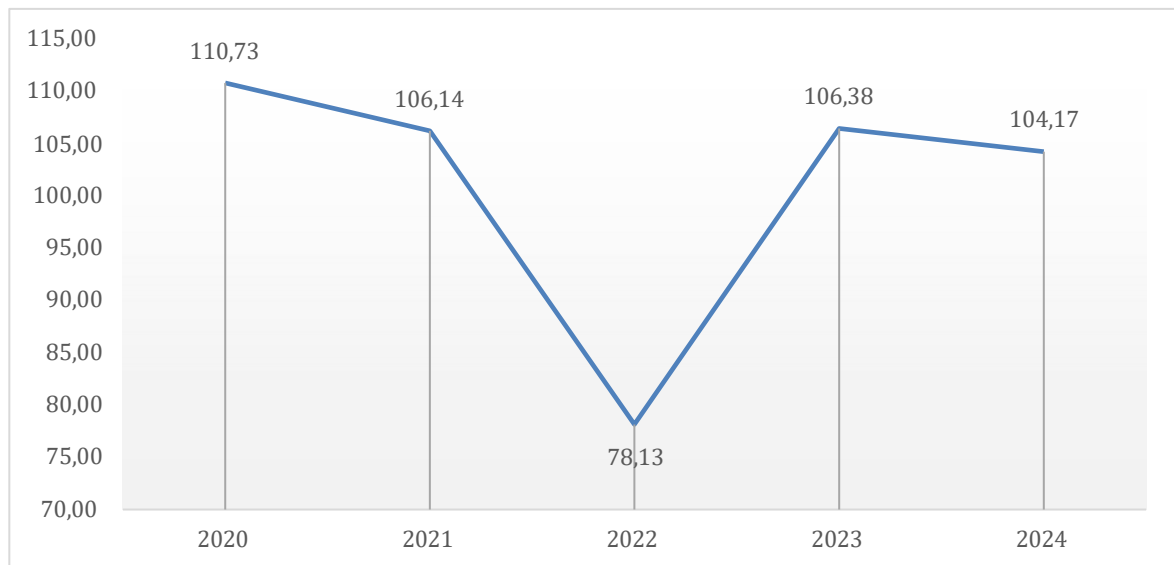
Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung SK4 antara lain:

- ✓ Melakukan pengujian berdasarkan metode analisis yang tepat dan efisien;
- ✓ Investasi peralatan laboratorium yang modern dan mutakhir berikut pemeliharannya;
- ✓ Mengadaptasikan teknik pengujian dan analisis sesuai metode analisa terbaru;
- ✓ Meningkatkan program intensifikasi pengawasan produk Obat dan Makanan;
- ✓ Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk

5) Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Berikut hasil kinerja Balai Besar POM Banjarbaru tahun 2020 – 2024 :



Gambar 1. 8. Tren Capaian Kinerja SK5 tahun 2020-2024

Pada Sasaran Kegiatan 5 ini, terdapat 1 (satu) indikator yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

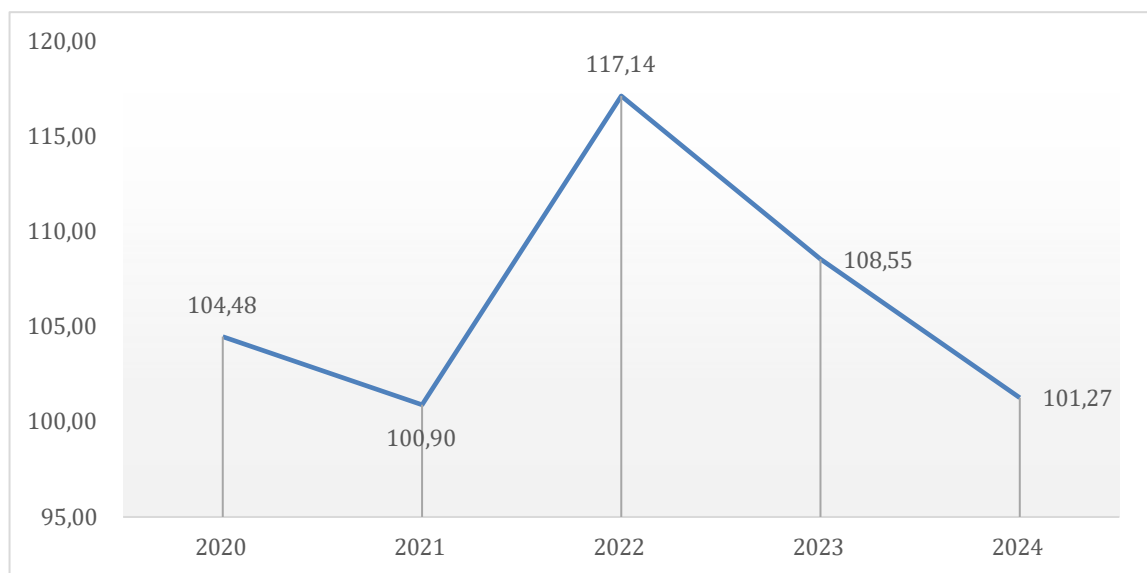


Apabila dilihat dari gambar di atas trend capaian kinerja SK5 ini terlihat menurun, namun sebenarnya relatif stabil di atas 100%. Penurunan capaian diakibatkan meningkatnya target tahunan sementara nilai realisasi tertinggi adalah 100%. Penurunan terendah terjadi di tahun 2022, dimana Balai Besar POM di Banjarbaru focus untuk menyelesaikan perkara-perkara carry over dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga sejak tahun 2023, tidak ada lagi perkara carry over yang harus diselesaikan.

6) Sasaran Kegiatan (SK6)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Hasil capaian kinerja SK6 Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2020-2024 digambarkan dalam grafik berikut :



Gambar 1. 9. Tren Capaian Kinerja SK6 tahun 2020-2024

Pada SK6 ini, terdapat 2 indikator yang diukur antara lain :

- IKSK6.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
- IKSK6.2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarbaru yang optimal.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pada kedua indikator ini antara lain :

- ✓ Terlaksananya roadmap peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) baik itu ruang lingkup, kompetensi, dan peralatan yang telah disusun pada awal tahun. Roadmap disusun berdasarkan analisa kebutuhan dengan melihat pedoman sampling tahun berjalan khususnya untuk kebutuhan parameter uji spesifik berdasarkan sistem regionalisasi laboratorium yang mana membutuhkan kompetensi, pemenuhan peralatan khusus serta peningkatan kemampuan uji terhadap standar ruang lingkup yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring evaluasi SKL secara rutin dan berkala setiap triwulan untuk melihat kendala dan hambatan dalam upaya pemenuhan SKL sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
- ✓ Memaksimalkan pemanfaatan email corporate unit dan individu, pemanfaatan Dashboard BCC, pemanfaatan sharing folder, pemanfaatan berita aktual serta pemutakhiran data SPIMKer dan SIPT.

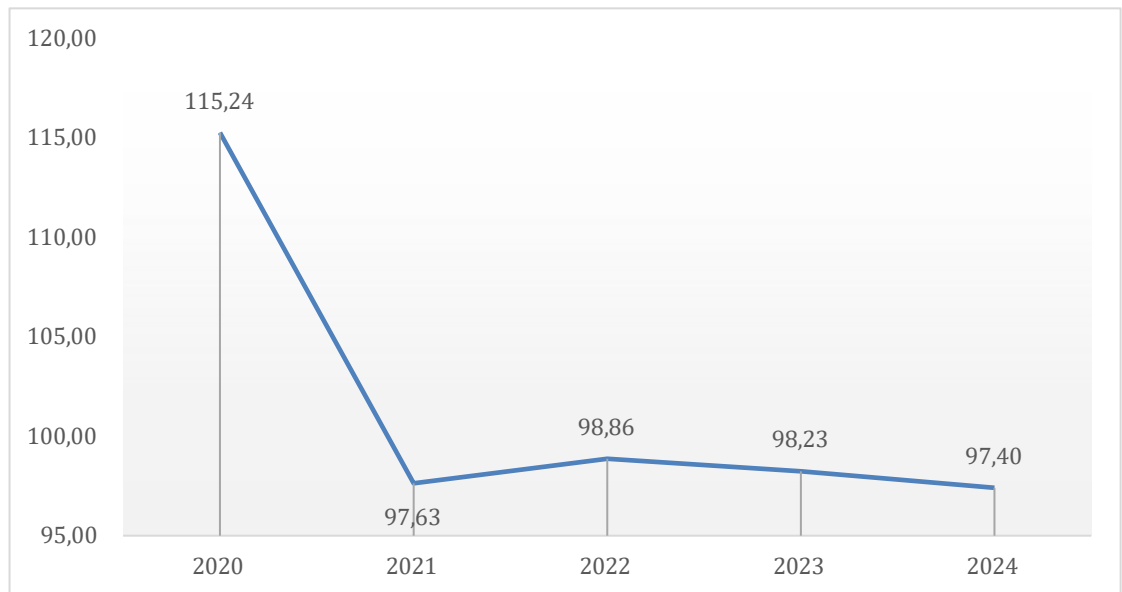
7) Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM Banjarbaru telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Banjarbaru diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan.

Tren capaian SK ini tergambar sebagai berikut :





Gambar 1. 10. Tren Capaian Kinerja SK7 tahun 2020-2024

Kesadaran masyarakat ditunjukkan melalui pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM Banjarbaru dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Untuk mengukur keberhasilan program dan capaian target kinerja SK7 ini menggunakan indikator kinerja : Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu”,

Berdasarkan profil capaian yang telah dilakukan dalam periode renstra 2020-2024, tergambar bahwa capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung stabil selama periode renstra.

Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian SK7 ini, antara lain :

- 1) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui:
 - a) Penguatan peran Balai Besar POM di Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalin kemitraan dengan lintas

sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan.

- b) Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer khususnya influencer lokal Kalimantan Selatan.
- c) Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dan lain-lain.
- d) Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan pamflet edukasi.

2) Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada Masyarakat:

- a) Menerapkan Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan
- b) Mempertimbangkan hasil survei kesadaran di provinsi Kalimantan Selatan, dari sisi demografi, komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat.

Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

- ✓ Memfokuskan tujuan dan materi/pesan secara terpusat dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
- ✓ Tujuan dan materi/pesan KIE disesuaikan dengan segmentasi target audience berdasarkan usia, pendidikan dan cakupan wilayah khususnya wilayah yang belum mendapatkan intervensi KIE.
- ✓ Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal/budaya daerah Kalimantan Selatan.

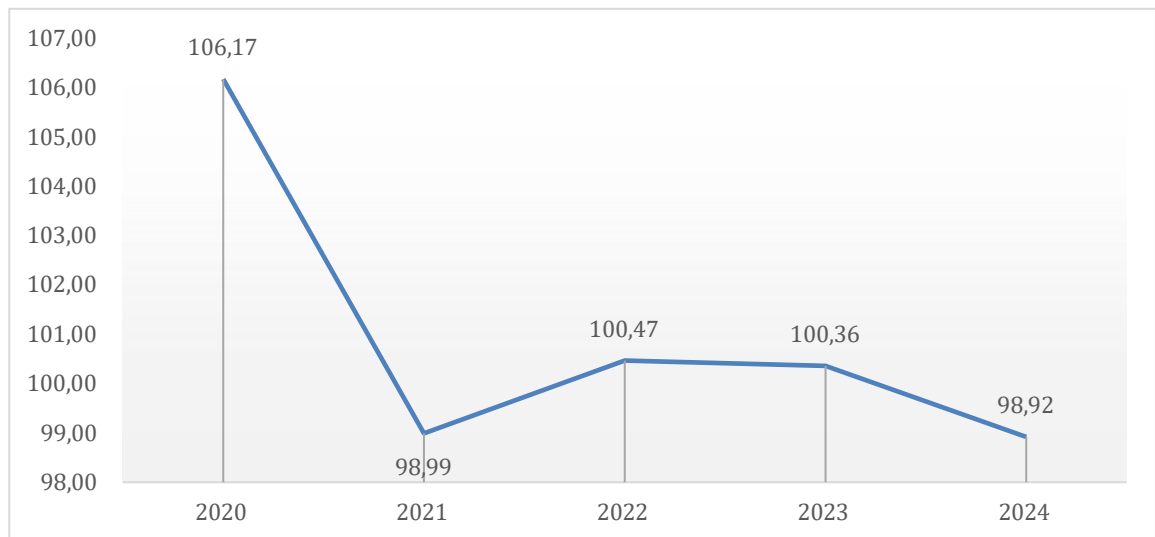


- ✓ Menggunakan media yang sesuai dengan target/kelompok sasaran penerima KIE. Media yang banyak diakses antara lain media televisi dan media sosial yang sesuai dengan usia dan platform.

8) Sasaran Kegiatan (SK8)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Hasil capaian kinerja SK8 Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2020-2024 ini digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 1. 11. Tren Capaian Kinerja SK8 tahun 2020-2024

Tren kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang baik. Penurunan justru terjadi pada tahun 2024 yang merupakan periode akhir Renstra 2020-2024.

Pada SK8, terdapat 3 indikator kinerja utama, yaitu :

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan,
- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan,
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.

Dari ketiga indikator kinerja utama, memberikan nilai capaian diatas 100% dari tahun 2022 hingga 2023. Nilai capaian kinerja di tahun 2024 menurun karena meningkatnya target tahun 2024 disesuaikan dengan realisasi di tahun 2023, namun Balai Besar POM di Banjarbaru tetap mampu mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi dari pelaku usaha terkait bimbingan dan pembinaan, serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dan layanan publiknya secara umum.

Dari survey kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun, Balai Besar POM di Banjarbaru mendapatkan gambaran apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kelemahan kelemahan pelayanan publik selama ini. Hasil SKM tersebut harus ditindaklanjuti dan dibuatkan rencana aksinya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan nilai capaian kinerja pada sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru.

Hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini, antara lain :

- ✓ Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural dan perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online.
- ✓ Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.
- ✓ Meningkatkan kerja sama dengan media dalam publikasi aktivitas pengawasan termasuk adanya contact person khusus.
- ✓ Meningkatkan komitmen dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.

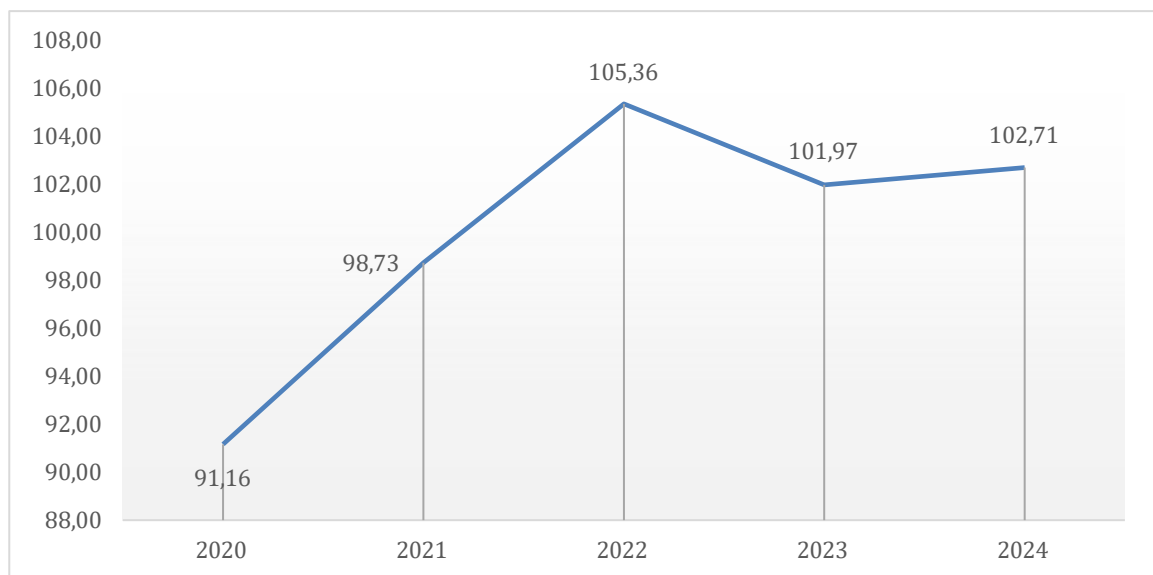


- ✓ Menjalinkan kerja sama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan BPOM dan menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen.

9) Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Tren capaian kinerja SK9 Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2020-2024 ini sebagai berikut.



Gambar 1. 12. Tren Capaian Kinerja SK9 tahun 2020-2024

Dalam mencapai target sasaran kegiatan ini digunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

- Indeks RB Balai Besar POM di Banjarbaru
- Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarbaru
- Nilai Pengelolaan Kearsipan

Di tahun 2020 dan 2021 kedua indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga capaiannya dibawah 100% namun di tahun 2023 hingga 2024 capaiannya telah melampaui target dengan capaian 105,36% dan 101,97%, hal ini disebabkan tercapainya target Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Banjarbaru di atas 100%, sedangkan indikator Nilai AKIP masih belum mencapai target. Di tahun 2024, indikator Indeks RB

mengalami penurunan, sedangkan Nilai AKIP meskipun belum berhasil mencapai target tetapi mengalami peningkatan dan mampu memperoleh kategori A.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Banjarbaru meliputi pemantauan berkala terhadap rencana kerja, evaluasi peningkatan kompetensi dan penanganan pengaduan, peninjauan standar pelayanan, serta pelaksanaan perbaikan berkelanjutan dan pengembangan inovasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

Untuk Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarbaru, meskipun terjadi peningkatan pada pencapaian kinerja, sistem manajemen akuntabilitas kinerja instansi menunjukkan beberapa kelemahan di berbagai area. Kelemahan tersebut mencakup masalah pada perencanaan kinerja (seperti dokumen yang belum dipublikasikan dan Perjanjian Kinerja yang belum diperbarui), pengukuran kinerja (termasuk inkonsistensi data, kendala yang tidak teranalisis dengan baik, dan pengisian yang tidak tertib), pelaporan kinerja (ketidaklengkapan analisis dan perbedaan data antar laporan), serta evaluasi internal (pelatihan yang belum merata dan analisis yang tidak memadai terkait capaian target, kendala, dan rencana tindak lanjut). Singkatnya, terdapat isu yang signifikan dalam hal konsistensi data, analisis kendala, dan kelengkapan pelaporan di seluruh siklus manajemen kinerja. Sehingga poin-poin itu akan menjadi fokus untuk meningkatkan capaian indikator ini di tahun berikutnya.

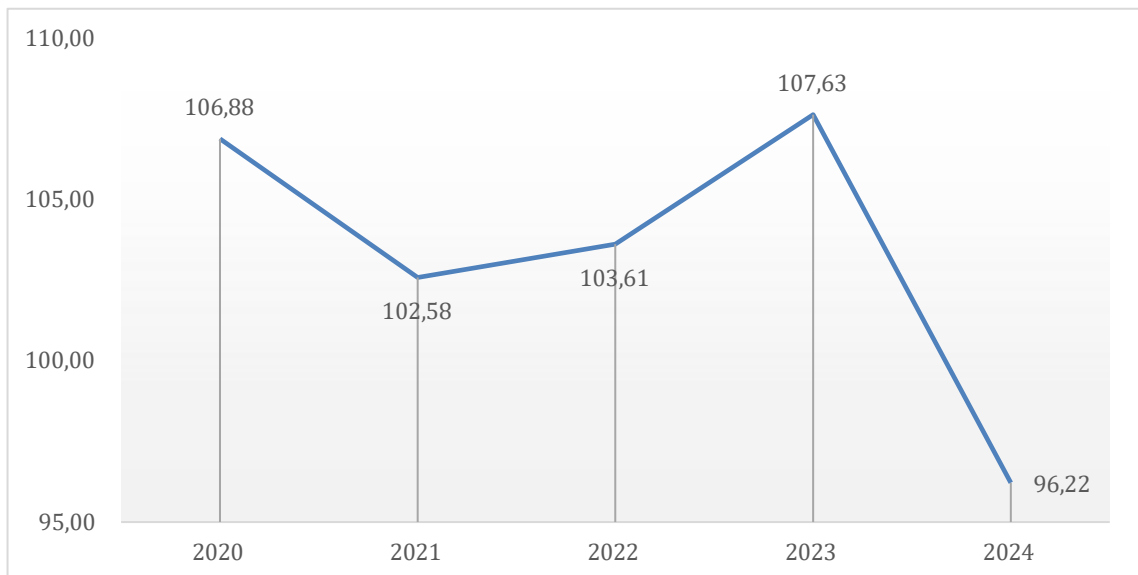
Nilai Pengelolaan Kearsipan telah diterapkan sejak tahun 2021 untuk Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dan sejak tahun 2022 untuk Loka POM. Indikator ini menjadi target kinerja utama pada tahun 2024. Pencapaian tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, menandakan adanya peningkatan kualitas dalam pengelolaan kearsipan.



10) Sasaran Kegiatan (SK10)

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Berikut adalah tren SK10 Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2020-2024:



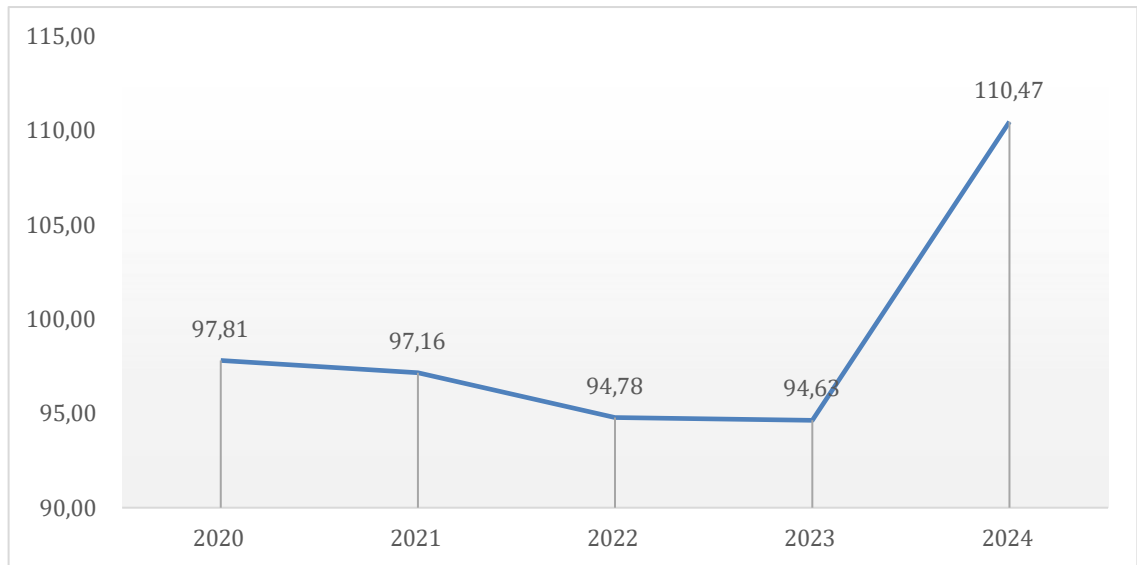
Gambar 1. 13. Tren Capaian Kinerja SK10 tahun 2020-2024

Capaian kinerja SDM Balai Besar POM di Banjarbaru, yang diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN, menunjukkan hasil yang optimal dari tahun 2020 hingga 2023, dimana realisasinya selalu melebihi 100%. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 107,63%, dan terendah pada tahun 2021 sebesar 102,58%.

Namun, pada tahun 2024, terjadi perubahan signifikan pada metode pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Perubahan ini, yang mengacu pada surat dari BKN dan mencakup empat dimensi serta pembobotan baru, membuat indikator tersebut tidak dapat dicapai oleh BPOM dan seluruh unit kerjanya. Sebagai tindak lanjut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM menerbitkan Nota Dinas Nomor KP.17.21.11.24.349 pada 26 November 2024. Nota dinas ini memutuskan untuk mengeluarkan capaian Indeks Profesionalitas ASN dari perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebagai respons atas usulan penyesuaian target.

11) Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel



Gambar 1. 14. Tren Capaian Kinerja SK11 tahun 2020-2024

Tren sasaran kegiatan ini dari tahun 2020 terus menurun sampai tahun 2023 di titik terendah capaiannya yaitu 94,63% namun kembali meningkat di akhir tahun 2024 dengan nilai capaian 110,47%. Hal ini dipengaruhi oleh capaian dari realisasi indikator kinerja yang baru di tahun 2024 serta peningkatan capaian untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru meskipun belum mencapai target pada tahun 2024, yang menunjukkan upaya perbaikan yang konsisten atas capaian yang tidak tercapai di tahun-tahun sebelumnya membuahkan hasil yang baik.

Sasaran kegiatan ini terdiri atas empat Indikator kinerja yaitu

- Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru
- Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa di Balai Besar POM di Banjarbaru
- Nilai Pengelolaan BMN di Balai Besar POM di Banjarbaru
- Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.

Dalam menghadapi berbagai kendala pengelolaan anggaran, Balai Besar POM di Banjarbaru telah dan akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja. Strategi utama mencakup peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan menyelaraskan target dan mengoptimalkan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA, serta



percepatan dan perbaikan proses pengadaan barang/jasa melalui identifikasi faktor risiko dan pelaksanaan pra-DIPA. Selain itu, langkah-langkah mitigasi risiko terhadap kebijakan pemerintah, monitoring dan evaluasi harian yang ketat, serta optimalisasi metode pembayaran seperti penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan mekanisme Langsung (LS) juga menjadi fokus. Seluruh upaya ini bertujuan untuk memastikan realisasi anggaran berjalan efektif dan efisien.

1.1.2 Aspirasi/Ekspektasi Stakeholder

Aspirasi dan masukan masyarakat menjadi salah satu komponen penting dalam proses perencanaan strategis BBPOM di Banjarbaru. Partisipasi publik berperan signifikan dalam membantu BBPOM di Banjarbaru memahami kebutuhan, harapan, serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam kaitannya dengan keamanan pangan, mutu obat, serta ketersediaan produk kesehatan yang aman dan bermutu. Masyarakat memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan perilaku konsumsi yang cerdas dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan perlunya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Amanat ini menjadi dasar penting bagi penyelenggara layanan untuk memberikan ruang partisipasi kepada publik dalam setiap tahapan penyelenggaraan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Balai Besar POM di Banjarbaru setiap tahunnya melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam merupakan wadah partisipasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan mutu layanan pengawasan

obat dan makanan. Melalui forum ini, berbagai kelompok stakeholder menyampaikan kebutuhan, masukan, serta harapan terhadap kinerja Balai Besar POM Banjarbaru agar layanan publik yang diberikan semakin efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kelompok yang terlibat dalam FKP terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a) Penyelenggara Layanan (Internal)
- b) Pemerintah Daerah
- c) Pelaku Usaha
- d) Masyarakat/ Konsumen
- e) Dunia Pendidikan
- f) Aparat Penegak Hukum
- g) Media Masa

Dari FKP yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan tahun 2025 didapat beberapa point masukan aspirasi, meliputi:

- a) Pengawasan produk dan sarana distribusi Obat dan makanan.
Peningkatan pengawasan peredaran narkoba dan Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan sarana distribusi serta pelayanan terutama klonik kecantikan
- b) Proses/ Alur Izin edar produk obat dan makanan
Adanya kesenjangan informasi dan pemahaman regulasi di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah cukup sebagai legalitas untuk mengedarkan produk pangan olahan
- c) Sosialisasi dan edukasi mengenai hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap layanan public.
Masalah ini menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan dalam mekanisme atau budaya pengaduan publik. Tidak adanya laporan bukan berarti pelayanan publik sudah optimal, namun bisa jadi karena:
 - Masyarakat tidak mengetahui saluran pengaduan atau cara menyampaikannya.
 - Masyarakat enggan atau takut mengadukan karena berbagai alasan (misalnya takut mendapat dampak negatif atau merasa tidak akan ditindaklanjuti).



- Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap layanan publik.

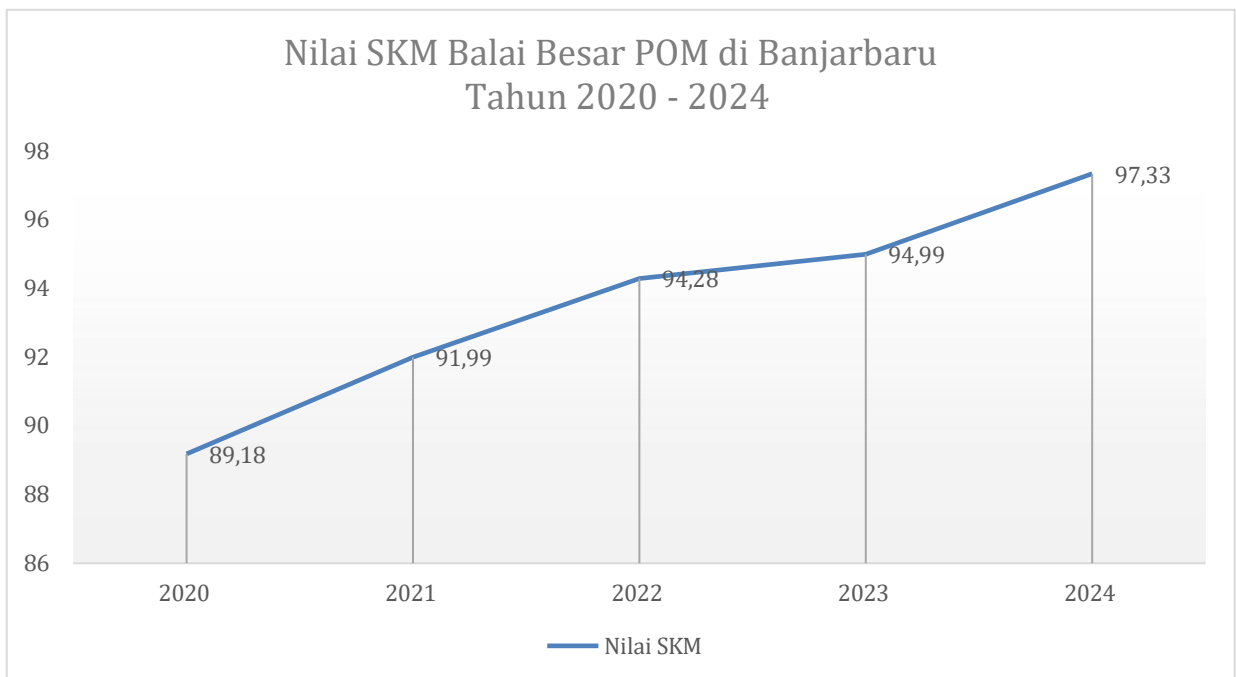
Selain itu sebagai bentuk implementasi prinsip transparansi dan partisipatif dalam tata kelola pemerintahan yang baik, BBPOM di Banjarbaru secara rutin melakukan penjangkaran aspirasi melalui berbagai mekanisme, salah satunya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja BBPOM di Banjarbaru yang dilakukan langsung kepada responden masyarakat di provinsi Kalimantan Selatan. Survei ini bertujuan memperoleh data empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan. Hasil survei tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses penyusunan Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029, sehingga arah kebijakan dan program pengawasan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan perkembangan lingkungan strategis nasional maupun global. Melalui sinergi dan kolaborasi antara BPOM dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan sistem pengawasan obat dan makanan nasional dapat semakin tangguh, modern, dan berdaya saing guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan terlindungi.

Dalam penentuan jumlah responden, terlebih dahulu menghitung jumlah populasi penerima layanan pada periode sebelumnya dari setiap jenis layanan Balai Besar POM di Banjarbaru. Selanjutnya, dari jumlah populasi tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan tabel Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2017 sehingga didapatkan jumlah minimum sampel yang akan dijadikan sebagai responden, sehingga didapatkan lah unsur respondens berdasarkan jenis layanan sebagai berikut:

1. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
2. Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
3. Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)
4. Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika
5. Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

- 6. Pengujian Obat dan Makanan
- 7. Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Besar POM di Banjarbaru dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 1. 15. Nilai SKM BBPOM di Banjarbaru Tahun 2020 - 2024

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024 pada Balai Besar POM di Banjarbaru.

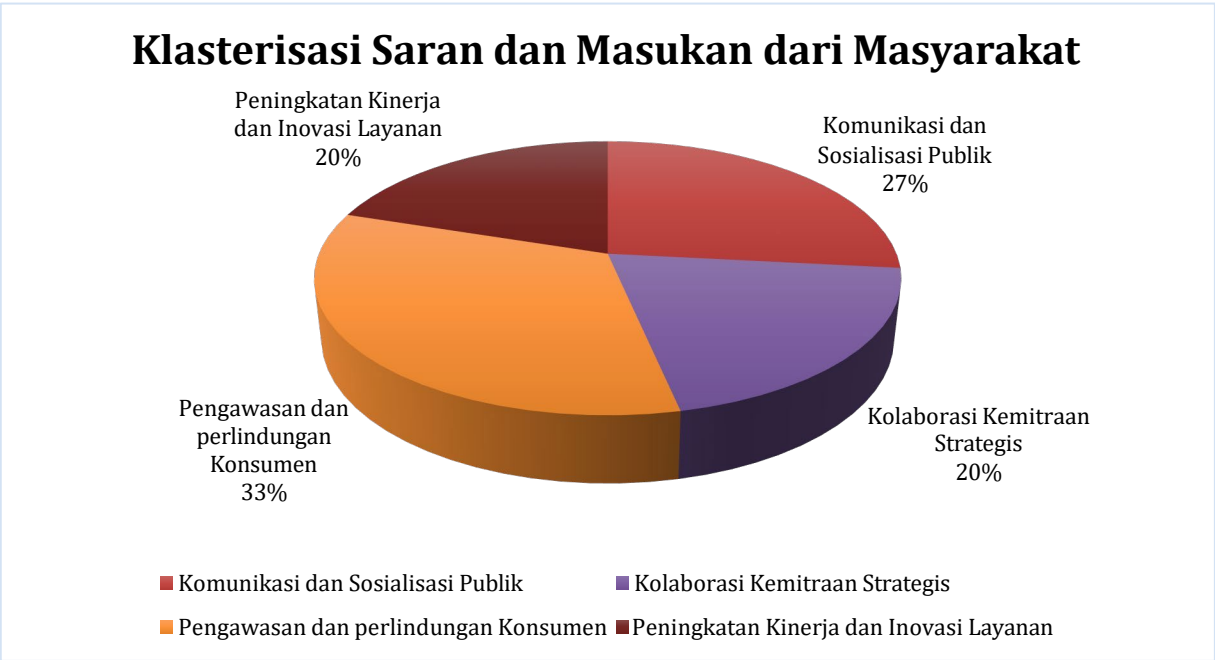
Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat, dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:



- 1) BBPOM di Banjarbaru dapat mempertahankan pelayanan publik yang telah baik dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap layanan publik
- 2) BBPOM di Banjarbaru melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar dan memberikan perlindungan masyarakat dengan produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat.
- 3) BBPOM di Banjarbaru diharapkan dapat terus memberikan dukungan terhadap UMKM, dengan meningkatkan informasi dan pemahaman regulasi di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM.
- 4) BBPOM di Banjarbaru agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Selain keempat poin tersebut, pada kegiatan yang melibatkan diskusi dengan pakar gender dan organisasi masyarakat dengan kebutuhan khusus, BBPOM di Banjarbaru diharapkan dapat lebih memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan pengalaman dari setiap elemen masyarakat baik berdasarkan gender maupun berdasarkan kelompok rentan secara fisik (termasuk disabilitas).

Klasterisasi saran dan masukan Masyarakat dan stakeholder berdasarkan hasil FKP dan SKM tahun 2024 dan 2025:



Gambar 1. 16. Klasterisasi Saran dam Masukan dari Masyarakat

1.2 Potensi Permasalahan

Balai Besar POM di Banjarbaru, sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi. Dalam menyusun Renstra Balai Besar POM di Banjarbaru 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai Besar POM di Banjarbaru dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarbaru 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai Besar POM di Banjarbaru diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan,



tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai Besar POM di Banjarbaru tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai Besar POM di Banjarbaru menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai Besar POM di Banjarbaru periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai Besar POM di Banjarbaru, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarbaru, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai Besar POM di Banjarbaru keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai Besar POM di Banjarbaru di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Banjarbaru, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1) Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko

Balai Besar POM di Banjarbaru telah tersertifikasi ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu dan ISO/IEC 17025 untuk laboratorium pengujian, yang mencakup layanan pengawasan dan pengujian mutu Obat dan Makanan. Sertifikasi ini memastikan seluruh proses pelayanan dan pengujian dilaksanakan secara terstandar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil pengawasan memiliki validitas tinggi dan diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan mitra kerja terhadap kredibilitas hasil pengujian serta meningkatkan efektivitas pengawasan di Kalimantan Selatan karena keputusan dan tindak lanjut pengawasan didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya. Didukung pedoman pengawasan berbasis risiko yang komprehensif dan mutakhir, Balai Besar POM di Banjarbaru semakin kokoh sebagai lembaga yang kredibel, akuntabel, dan adaptif dalam menjamin keamanan, mutu, serta manfaat Obat dan Makanan bagi masyarakat..

2) Infrastruktur dan Fasilitas Laboratorium yang Memadai

Laboratorium Balai Besar POM di Banjarbaru memiliki empat laboratorium utama—Obat dan NAPZA, Obat Bahan Alam dan Kosmetik, Pangan, serta Mikrobiologi yang mampu melakukan pengujian menyeluruh terhadap berbagai produk yang beredar di wilayah dengan keragaman geografis dan pola konsumsi khas, termasuk pangan tradisional, produk herbal, serta olahan hasil perikanan dan peternakan. Didukung peralatan berstandar internasional seperti HPLC dengan detektor UV, PDA, RID dan Fluorescence (High-Performance Liquid Chromatography), Atomic Absorption Spectroscopy, GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) dengan Headspace Sampler, ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy), HPTLC (HighPerformance Thin Layer Chromatography), dan RTi-PCR (Real time - Polymerase Chain Reaction) dengan jumlah yang memadai, laboratorium Balai Besar POM di



Banjarbaru mampu melakukan analisis kompleks, mulai dari cemaran logam berat, bahan berbahaya, residu obat, hingga identifikasi DNA tinggi pada produk olahan.

Balai Besar POM di Banjarbaru memiliki penguji yang kompeten dengan jumlah yang memadai dalam melakukan pengujian Sediaan Farmasi dan Makanan. Kapasitas laboratorium Balai Besar POM di Banjarbaru mampu melakukan pengujian sesuai dengan target yang telah ditentukan baik sampel dari Balai Besar POM di Banjarbaru maupun dari UPT lain dalam regional yang sama. Kapasitas peralatan pengujian Balai Besar POM di Banjarbaru mampu memenuhi permintaan uji sampel pihak ketiga baik dari kepolisian, BNN, dinas kesehatan maupun upt lain dan pihak swasta.

Salah satu keunggulan spesifiknya adalah kemampuan untuk menguji zat aktif Carisoprodol, yang menjadi barang bukti utama dalam sejumlah kasus penindakan obat ilegal. Kapasitas ini menjadikan Balai Besar POM di Banjarbaru berpotensi menjadi laboratorium rujukan di wilayah Kalimantan ataupun wilayah tengah Indonesia lainnya yang mampu menangani kasus obat secara cepat dan akurat tanpa harus mengirim sampel ke laboratorium pusat. Kondisi ini mempercepat proses tindak lanjut penegakan hukum, meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat Kalimantan Selatan dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

3) Infrastruktur Pelayanan Publik yang Terstandar dan Mendukung Tugas Pengawasan

Untuk memastikan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM memiliki standar infrastruktur pelayanan publik yang seragam, BPOM telah menyusun Grand Design Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan UPT BPOM sejak tahun 2021 dan terus menyempurnakannya hingga tahun 2024. Dokumen tersebut telah disahkan melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor 227 Tahun 2024. Balai Besar POM di Banjarbaru menjadi salah satu UPT yang

secara nyata telah mewujudkan pemenuhan grand design tersebut melalui penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang modern, inklusif, dan fungsional guna menunjang efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Selatan.

Balai Besar POM di Banjarbaru memiliki tiga gedung utama yaitu Gedung C (Pelayanan Publik), Gedung A (Laboratorium), dan Gedung B (Perkantoran dan Laboratorium), serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti loket layanan publik terpadu, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, rumah dinas, kendaraan operasional, dan media informasi yang representatif. Fasilitas ini dirancang sesuai Standar Pelayanan Publik BPOM yang mencakup aspek waktu layanan, transparansi biaya, serta kepastian prosedur (SLA). Kinerja pelayanan publik Balai Besar POM di Banjarbaru terus menunjukkan tren positif, dibuktikan dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2021, capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,75 pada tahun 2024 yang masuk kategori “Pelayanan Prima”, serta layanan publik lebih dari 1.200 permohonan tiap tahunnya dengan tingkat pemenuhan SLA di atas 95%.

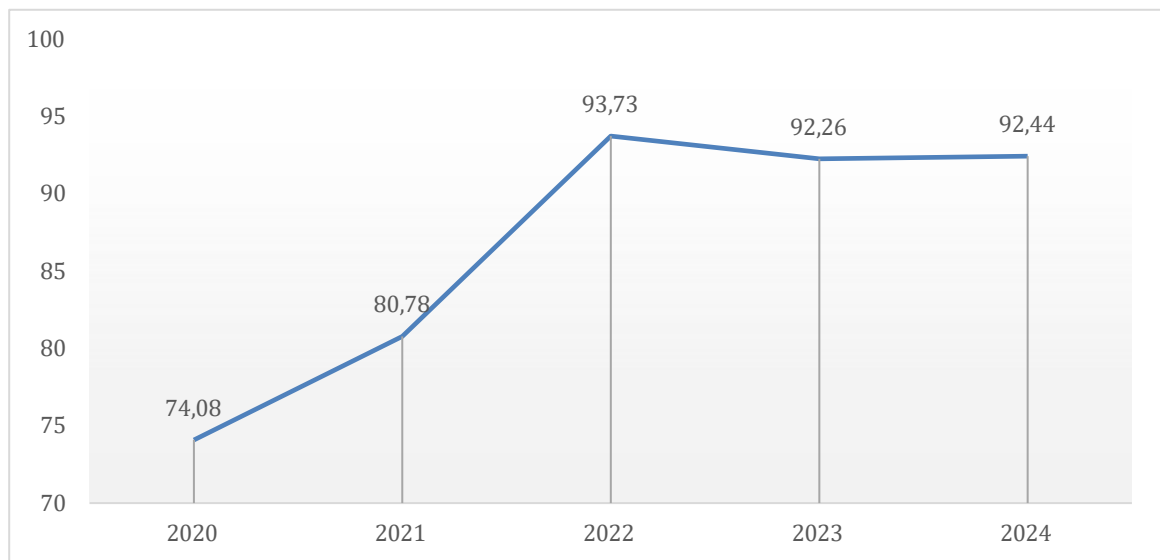
Pencapaian ini menunjukkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana tidak hanya memperbaiki tampilan fisik, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas layanan, efisiensi kinerja, dan kepercayaan publik. Dengan dukungan infrastruktur yang memenuhi grand design BPOM, Balai Besar POM di Banjarbaru menegaskan perannya sebagai UPT percontohan layanan publik yang unggul, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif di Kalimantan Selatan.

4) Komitmen kepemimpinan yang kuat

Kepemimpinan Balai Besar POM di Banjarbaru menunjukkan komitmen yang nyata dan berdampak melalui berbagai capaian konkret. Hal ini tercermin dari penyelesaian pembangunan gedung kantor dan laboratorium baru tahun 2022 yang meningkatkan kapasitas layanan. Komitmen kepemimpinan juga berhasil memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi,



dan dunia usaha untuk mendukung pembinaan UMKM dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Berbagai langkah ini menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan Balai Besar POM di Banjarbaru telah menghasilkan pengawasan yang lebih efektif, pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi yang adaptif serta berintegritas tinggi dalam melindungi kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan.



Gambar 1. 17. Indeks RB BBPOM di Banjarbaru tahun 2020-2024

Pembangunan Zona Integritas, yang tidak akan optimal tanpa komitmen pimpinan, sepanjang 2020-2024 terlaksana dengan sangat baik dan telah mencapai predikat yang menunjukkan upaya reformasi birokrasi di Balai Besar POM di Banjarbaru yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021. Di tahun-tahun berikutnya, dengan konsistensi komitmen tinggi pimpinan, Balai Besar POM di Banjarbaru mampu meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada angka yang melesat signifikan (berkisar pada nilai 92,26 - 93,73) bahkan dibanding pada tahun pencapaian predikat WBK pada tahun 2021 (80,78).

5) Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM

Balai Besar POM di Banjarbaru didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas

dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Balai Besar POM di Banjarbaru mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Sebagaimana Bagan Organisasi Balai Besar POM di Banjarbaru, seyogyanya terdapat 2 (dua) orang Pejabat Struktural yaitu Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru dan Kepala Bagian Tata Usaha, selebihnya adalah Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Namun pada saat Renstra ini disusun, Balai Besar POM di Banjarbaru belum memiliki Kepala yang definitive, dan sementara jabatan tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) yang sehari-harinya merupakan seorang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya.

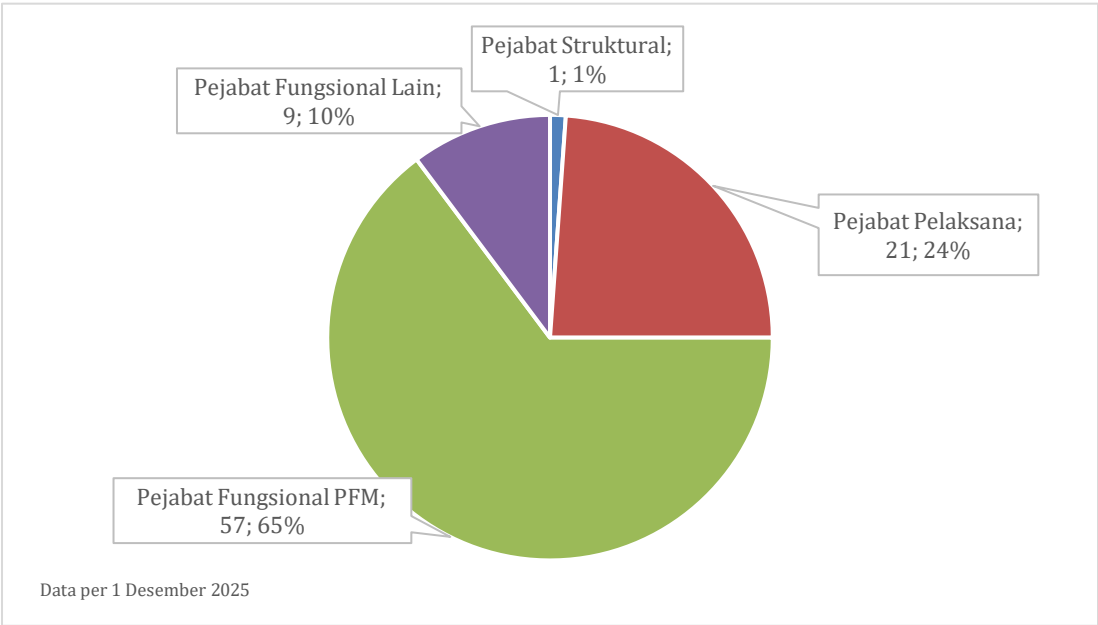
Jumlah pegawai Balai Besar POM di Banjarbaru per 1 Desember 2025 adalah 88 orang, terdiri dari 1 Pejabat Struktural (Kepala Bagian Tata Usaha); 57 pegawai teknis Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan 30 pegawai yang terdiri dari pejabat fungsional lain serta pejabat pelaksana.

Tabel 1. 3. Jumlah Pegawai BBPOM di Banjarbaru Per Jabatan

No.	Jabatan Struktural / Fungsional	Jumlah Pegawai
1	Kepala Bagian Tata Usaha	1
2	Pengawas Farmasi dan Makanan	57
3	Pranata Komputer	3
4	Pranata Keuangan APBN	2
5	Arsiparis	2
6	Analisis SDM Aparatur	1
7	Perencana	1
8	Penata Kelola Obat dan Makanan	1
9	Asisten Kelola Obat dan Makanan	1
10	Penata Layanan Operasional	5

No.	Jabatan Struktural / Fungsional	Jumlah Pegawai
11	Pengelola Layanan Operasional	11
12	Pelaksana	2
13	Operator Layanan Operasional	1

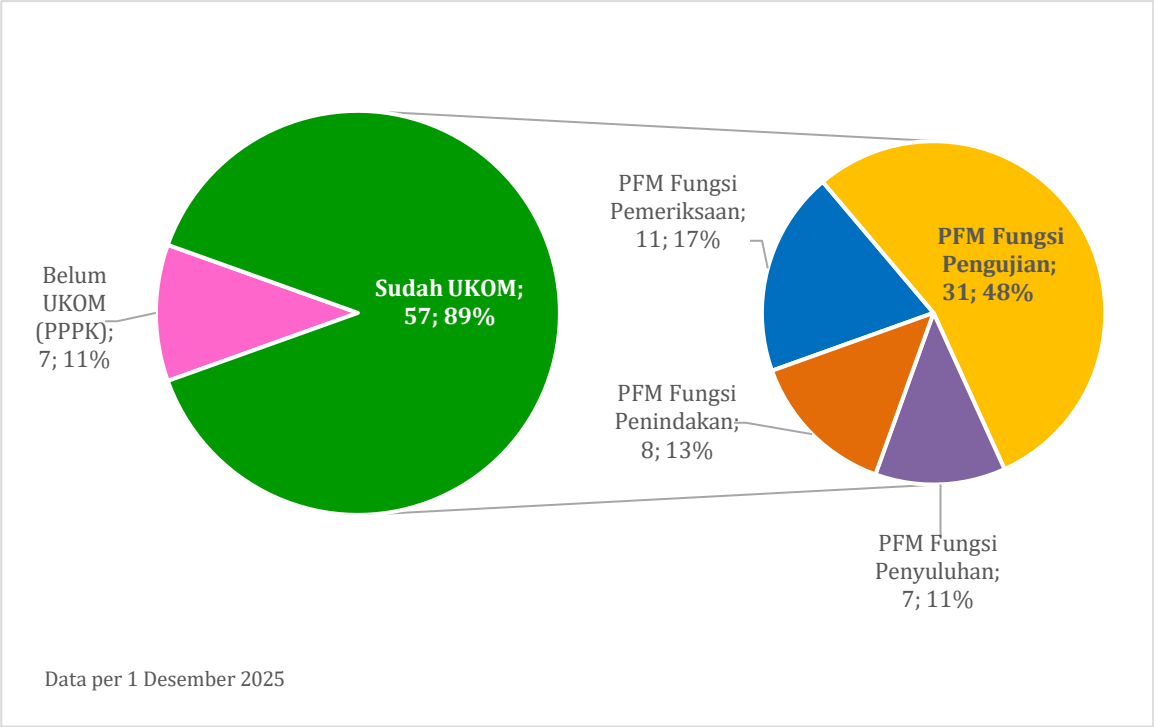
Dari tabel di atas terlihat, Balai Besar POM di Banjarbaru memiliki 6 Jabatan Fungsional dan 6 jabatan pelaksana dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Berikut grafik komposisi pegawai Balai Besar POM di Banjarbaru berdasarkan jenis jabatan :



Gambar 1. 18. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis jabatan

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai Besar POM di Banjarbaru merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk, sehingga mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap pengawasan obat dan makanan. Untuk dapat melakukan pengawasan obat dan makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya.

Sampai dengan Tahun 2025, sebanyak 67 pegawai merupakan Pejabat Struktural dan Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 65% dari pegawai tersebut atau 57 pegawai merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan, terdiri dari 31 pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 11 pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 7 pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan, 8 pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan.



Gambar 1. 19. Jumlah Pegawai Teknis yang Mengikuti Ujian Kompetensi

Dari 57 pegawai teknis Balai Besar POM di Banjarbaru, 50 pegawai telah dilakukan uji kompetensi baik melalui Pemetaan Kompetensi dan Uji Kompetensi dalam rangka Kenaikan Jabatan, sedangkan 7 Pegawai belum dilakukan Uji Kompetensi merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kompetensi teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah.

6) Tersedianya e-office yang Menunjang Efektivitas Pelaksanaan Tugas

Digitalisasi proses kerja di Balai Besar POM di Banjarbaru telah membawa transformasi signifikan dalam cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Melalui penerapan sistem informasi manajemen terintegrasi BPOM serta pemanfaatan e-office nasional dan e-office internal, seluruh proses administrasi dan pengawasan menjadi lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, Balai Besar POM di Banjarbaru juga mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Balai Besar POM di Banjarbaru (SiBOB) sebagai inovasi digital untuk mendukung efektivitas pengelolaan data dan pemantauan kegiatan.

Pemanfaatan SiBOB memperkuat integrasi data antara bidang teknis dan manajerial, mempercepat proses tindak lanjut hasil pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja. Dengan demikian, digitalisasi yang dijalankan tidak hanya mempercepat proses kerja dan komunikasi internal, tetapi juga memperkuat sinergi antara Balai Besar POM di Banjarbaru, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

7) Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Balai Besar POM di Banjarbaru aktif mengedukasi dan melibatkan masyarakat Kalimantan Selatan dalam isu keamanan obat dan makanan melalui berbagai program pemberdayaan dan kampanye edukasi publik yang terstruktur. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan produk yang beredar di lingkungannya.

Hingga tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru telah membina lebih dari 608 kader keamanan pangan yang tersebar di 23 desa, pada 13 kabupaten/kota, serta membentuk 138 komunitas masyarakat peduli obat dan makanan. Selain itu, program Pangan Aman di Sekolah telah menjangkau 67 sekolah dasar dan 36 sekolah menengah pertama

dan 9 Sekolah menengah atas, dan serta Program Pasar Aman Berbasis Komunitas telah dilakukan intervensi terhadap komunitas pasar yang tersebar di 10 Pasar yang ada di Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan.

Pendekatan edukatif dan partisipatif ini terbukti memperkuat efektivitas sistem pengawasan dari dalam, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu. Kemitraan strategis antara Balai Besar POM di Banjarbaru dan masyarakat ini menciptakan ekosistem pengawasan berbasis komunitas yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan publik di Kalimantan Selatan.

Selain itu, sepanjang tahun 2020 hingga 2024, sebanyak 528 UMKM telah didampingi oleh Balai Besar POM di Banjarbaru dengan jumlah Nomor Izin Edar/ notifikasi terbit sebanyak 530. Hal ini menunjukkan upaya meningkatkan daya saing produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Selatan.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai Besar POM di Banjarbaru tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai Besar POM di Banjarbaru menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Banjarbaru, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1) Manajemen Sumber Daya Manusia yang belum optimal

Manajemen SDM merupakan manajemen dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan terkait



sumber daya manusia di suatu organisasi. Manajemen SDM bertujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang efektif. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama untuk meraih capaian jangka panjang dengan merancang strategi yang mendukung pertumbuhan dan produktivitas suatu instansi. Dari perekrutan, pengembangan karir, manajemen kinerja hingga kesejahteraan karyawan, manajemen SDM mencakup berbagai aspek yang memastikan setiap individu dapat memberikan kontribusi terbaiknya. Dengan manajemen SDM yang baik, suatu instansi dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif yang dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai, pemastian kepuasan pegawai, dukungan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi serta fasilitasi inovasi dan kreativitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, manajemen ASN dan pola rotasi/mutasi merupakan salah satu bagian dari manajemen SDM. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional serta memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu penilaian pelaksanaan norma, prosedur, standar dan kriteria (NPSK) dalam penyelenggaraan Manajemen ASN yaitu dengan mencegah terjadinya pelanggaran NSPK Manajemen ASN. Namun, dalam kurun waktu 2023-2024, masih terdapat pelanggaran NSPK di lingkungan Balai Besar POM di Banjarbaru. Pelaksanaan rotasi dan mutasi internal di Balai Besar POM di Banjarbaru belum menunjukkan adanya pertimbangan kompetensi dan pola mutasi internal yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya manajemen ASN yang telah diupayakan oleh Balai Besar POM di Banjarbaru.

Belum optimalnya manajemen SDM dapat menghambat kemampuan Balai Besar POM di Banjarbaru dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan serta dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal Balai Besar POM di Banjarbaru, tetapi juga

pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan dalam manajemen SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

2) Optimalisasi Diseminasi Informasi dan Citra Lembaga melalui Media Digital Masih Terbatas

Branding hasil kerja merupakan langkah penting untuk memperkuat citra Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai institusi yang kredibel, profesional, dan hadir nyata dalam melindungi masyarakat. Namun dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kelemahan konkret yang perlu diperbaiki. Saat ini, pemanfaatan media sosial sebagai sarana branding dan komunikasi publik belum sepenuhnya optimal — baik dari segi konsistensi konten, frekuensi unggahan, maupun kedalaman pesan yang disampaikan. Konten sering kali lebih bersifat informatif satu arah, belum sepenuhnya menonjolkan hasil kerja konkret pengawasan atau dampak nyata layanan BPOM bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Selain itu, belum semua kegiatan pengawasan dan pelayanan publik terdokumentasi secara menarik dan komunikatif di media sosial, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami kontribusi Balai Besar POM di Banjarbaru dalam menjamin keamanan obat dan makanan. Minimnya analisis data interaksi digital juga membuat strategi komunikasi sulit dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan audiens lokal.

Kelemahan ini berdampak pada masih terbatasnya brand awareness publik terhadap peran dan hasil kerja Balai Besar POM di Banjarbaru. Padahal, penguatan branding digital yang terarah dapat berkontribusi langsung terhadap efektivitas pengawasan — misalnya melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan produk berisiko, peningkatan kepercayaan terhadap hasil uji laboratorium, serta percepatan respons layanan publik.

Ke depan, Balai Besar POM di Banjarbaru perlu memperkuat strategi branding berbasis hasil kerja, dengan menampilkan data kinerja



pengawasan, kisah nyata keberhasilan penindakan, inovasi pelayanan publik, serta testimoni masyarakat penerima manfaat. Pendekatan ini tidak hanya membangun citra positif, tetapi juga memperlihatkan dampak konkret pengawasan obat dan makanan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan.

3) Terbatasnya jangkauan wilayah pengawasan pre market dan post market

Keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama bagi Balai Besar POM di Banjarbaru dalam menjangkau seluruh wilayah pengawasan di Kalimantan Selatan yang memiliki karakter geografis beragam—mulai dari wilayah pesisir, pedalaman sungai, hingga perbatasan antarprovinsi. Dengan wilayah kerja di 7 kabupaten/kota dan cakupan wilayah lebih dari 38.000 km², intensitas kunjungan pengawasan baru mencapai sekitar 65% dari target sarana setiap tahunnya. Sebanyak 35% sarana berisiko, seperti pangan rumah tangga di wilayah hulu sungai, belum terpantau secara rutin akibat keterbatasan moda transportasi dan dukungan operasional. Kondisi ini berdampak pada potensi keterlambatan deteksi dini terhadap produk berisiko, serta kesenjangan dalam distribusi informasi keamanan pangan dan obat di daerah terpencil.

Keterbatasan moda transportasi darat menjadi kendala utama, karena sebagian lokasi hanya dapat diakses melalui transportasi air atau sungai, sementara armada operasional yang tersedia belum sepenuhnya memadai. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sarana, optimalisasi SDM pengawas, serta inovasi moda pengawasan—seperti perluasan penggunaan Kelotok Laboratorium Keliling (KERLING)—untuk memastikan pengawasan pre-market dan post-market dapat menjangkau seluruh wilayah berisiko tinggi secara tepat waktu dan efektif.

4) Pembangunan digital mindset dan transformasi digital yang belum optimal

Meskipun Balai Besar POM di Banjarbaru telah mulai menerapkan berbagai sistem informasi dan aplikasi pendukung pengawasan seperti

SiBOB, e-Office, serta pemanfaatan sistem pelaporan terintegrasi BPOM, penerapan *digital mindset* di tingkat pegawai dan efektivitas transformasi digital secara menyeluruh masih belum optimal.

Sebagian pegawai masih berorientasi pada pola kerja manual dan dokumentasi konvensional, terutama dalam proses administrasi dan pelaporan hasil pengawasan. Integrasi antar aplikasi internal juga belum sepenuhnya berjalan lancar, sehingga menimbulkan duplikasi input data dan keterlambatan dalam konsolidasi laporan lintas bidang. Rendahnya literasi digital di sebagian pegawai menyebabkan pemanfaatan fitur sistem digital belum maksimal, seperti analisis data berbasis dashboard atau penggunaan *data analytics* untuk pengambilan keputusan cepat.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet stabil di beberapa titik kerja, perangkat komputer dengan spesifikasi terbatas, dan belum adanya *digital champion* atau agen perubahan teknologi di setiap bidang turut memperlambat adopsi transformasi digital secara merata. Akibatnya, potensi digitalisasi untuk mempercepat proses layanan publik, memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko, dan meningkatkan transparansi data belum termanfaatkan secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi percepatan pembangunan budaya kerja digital melalui pelatihan literasi digital terarah, penetapan *digital leader* di tiap bidang, serta optimalisasi integrasi sistem informasi agar transformasi digital benar-benar menjadi pendorong peningkatan efektivitas pengawasan dan layanan publik di Kalimantan Selatan.

5) Layanan Perizinan

Kualitas dan kecepatan layanan perizinan di Balai Besar POM di Banjarbaru belum sepenuhnya konsisten antar jenis layanan dan periode waktu. Meskipun standar pelayanan telah ditetapkan melalui Standar Pelayanan Publik dan penerapan *Service Level Agreement* (SLA), dalam praktiknya masih terdapat variasi waktu penyelesaian, terutama



pada layanan konsultasi dan verifikasi dokumen perizinan industri pangan dan kosmetik.

Perbedaan kapasitas dan beban kerja antar bidang, serta keterbatasan jumlah petugas dengan kompetensi teknis perizinan, menyebabkan waktu respon terhadap permohonan bimbingan teknis atau klarifikasi dokumen kadang melebihi standar yang ditetapkan. Selain itu, sistem antrean dan *tracking* proses layanan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital sehingga pemohon belum dapat memantau status layanan secara real-time.

Faktor lain yang turut berpengaruh adalah variasi kualitas input dari pelaku usaha, terutama UMKM binaan yang masih memerlukan pendampingan intensif dalam penyusunan dokumen perizinan. Kondisi ini menyebabkan petugas perlu melakukan klarifikasi berulang, yang berdampak pada lamanya proses penyelesaian.

Konsistensi kualitas pelayanan juga belum optimal karena belum semua petugas memiliki pemahaman yang seragam terhadap prosedur pelayanan dan komunikasi publik berbasis *customer satisfaction*. Hal ini berpotensi menurunkan persepsi kepuasan masyarakat meskipun sebagian besar layanan tetap memenuhi standar formal.

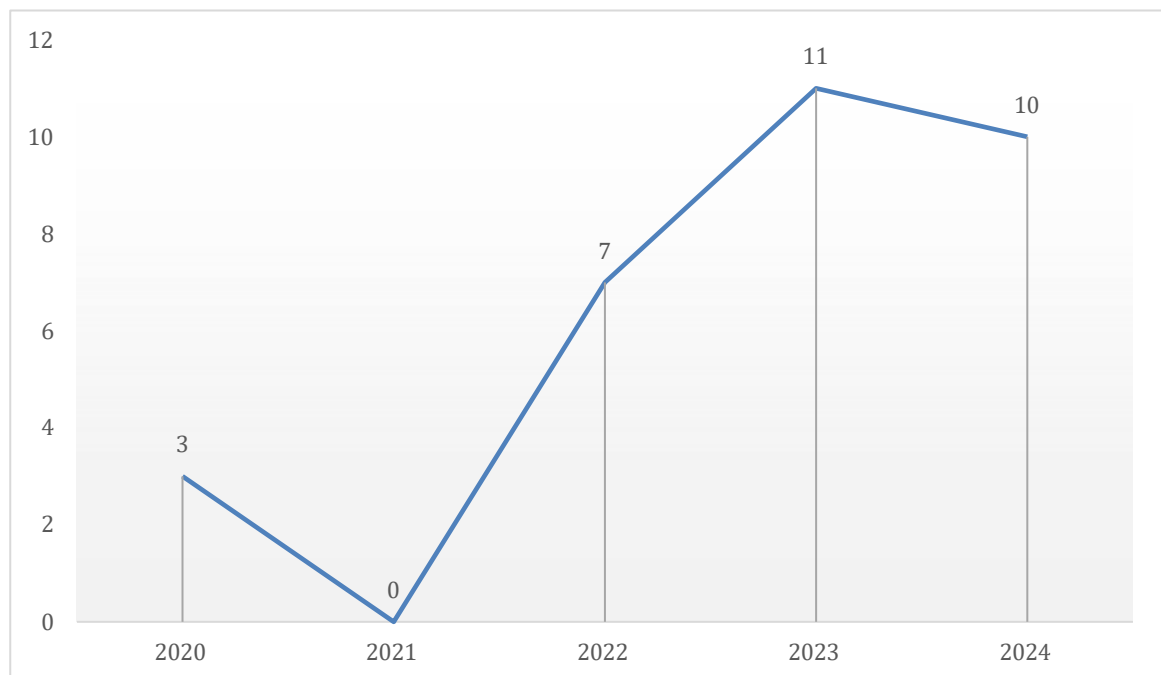
Kelemahan ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen mutu pelayanan, peningkatan kapasitas SDM teknis, serta integrasi sistem digital perizinan dan konsultasi daring yang transparan untuk memastikan kecepatan dan kualitas layanan publik Balai Besar POM di Banjarbaru berjalan lebih stabil, terukur, dan berorientasi pada kepuasan pelaku usaha.

6) Sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (*early warning*) belum terintegrasi

Balai Besar POM di Banjarbaru belum memiliki sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (*early warning system*) yang terintegrasi untuk mendeteksi secara cepat potensi KLB obat dan makanan, seperti kasus keracunan pangan, peredaran obat ilegal, atau temuan produk berisiko. Respons kedaruratan masih bersifat reaktif, bergantung pada

laporan manual dari masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, lintas sektor, maupun temuan pengawasan rutin, sehingga penanganan awal terhadap potensi risiko sering memerlukan waktu lebih lama.

Dalam konteks farmakovigilans di Kalimantan Selatan, pelaporan e-MESO dari fasilitas kesehatan masih sangat rendah, sehingga sinyal kejadian efek samping obat sulit terdeteksi secara dini. Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi urutan ke-14 dalam jumlah KTD/ESO yang dilaporkan. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelaporan KTD/ESO masih jauh dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Sepanjang tahun 2019 hingga 2024, pelaporan KTD/ESO di Kalimantan Selatan hanya menyumbang 0,57% dari jumlah laporan KTD/ESO di tahun 2024. Rendahnya jumlah laporan ini menyebabkan data farmakovigilans belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar analisis risiko dalam pengawasan post-market



Gambar 1. 20. Profil Jumlah Fasyankes Pelapor Farmakovigilans di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2024

Selain itu, belum tersedia sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan data sampling, hasil uji laboratorium, pengawasan post-market, dan laporan dari fasilitas kesehatan. Koordinasi lintas



bidang di internal Balai Besar POM di Banjarbaru maupun dengan instansi eksternal (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Kepolisian) juga belum sepenuhnya berbasis platform digital terpadu, tetapi masih mengandalkan surat, telepon, atau grup pesan instan.

Ketiadaan command center atau dashboard digital yang mampu membaca tren pengawasan dan memberikan peringatan otomatis semakin membatasi kemampuan deteksi dini. Keterbatasan infrastruktur data dan analisis prediktif menjadi hambatan utama dalam membangun sistem early warning yang responsif dan berbasis risiko.

Kondisi ini berdampak pada keterlambatan mitigasi risiko terhadap potensi peredaran produk berbahaya dan menurunkan efektivitas respon cepat pada situasi darurat keamanan pangan dan obat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem early warning berbasis data terintegrasi, peningkatan kapasitas pelaporan farmakovigilans khususnya e-MESO, serta pembentukan unit khusus sebagai sentra tanggap darurat untuk memperkuat kesiapsiagaan pengawasan di wilayah Kalimantan Selatan.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Banjarbaru untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1) Koordinasi dan Kolaborasi yang solid dengan stakeholder

Balai Besar POM di Banjarbaru memiliki peluang besar untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku

kepentingan—pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas pelayanan kesehatan, industri, akademisi, dan organisasi profesi. Arah kebijakan nasional, termasuk Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, memberikan landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Hingga tahun 2024, baru dua kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru) yang telah membentuk tim tersebut, menunjukkan bahwa potensi sinergi masih terbuka luas untuk diperkuat.

Selama periode 2020–2024, Balai Besar POM di Banjarbaru telah menjalin kerja sama lintas sektor dalam berbagai program seperti Criminal Justice System (CJS), pemberdayaan masyarakat (Desa Pangan Aman, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya), pendampingan UMKM, KIE, serta pengawasan rutin di kabupaten/kota. Meskipun koordinasi ini mendukung capaian kinerja, tingkat integrasi dan keberlanjutan sinergi masih dapat ditingkatkan agar lebih efektif menjawab tantangan pengawasan di Kalimantan Selatan.

Arah kebijakan nasional dan berbagai program pusat membuka peluang bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk mengonversi potensi tersebut menjadi program sinergi pengawasan daerah yang lebih terstruktur, termasuk memperluas pembentukan Tim Koordinasi di kabupaten/kota lain, memperkuat integrasi data dengan fasilitas kesehatan, serta memaksimalkan peran akademisi dan industri dalam inovasi dan penelitian. Peluang kolaborasi internasional, kemitraan riset, serta adopsi praktik terbaik global juga menjadi faktor eksternal yang dapat mendukung penguatan kapasitas pengawasan Balai jika dikelola secara sistematis.

Dengan memanfaatkan peluang ini, Balai Besar POM di Banjarbaru dapat mengembangkan model kolaborasi yang lebih adaptif dan komprehensif, memperkuat ekosistem pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.



2) Transformasi digital dalam pelayanan publik dan digitalisasi proses bisnis

Pertumbuhan penduduk usia produktif dan percepatan transformasi digital nasional membuka peluang strategis bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk memperkuat kualitas pengawasan obat dan makanan. Tidak hanya berfokus pada isu makro seperti bonus demografi dan definisi transformasi digital, peluang yang paling relevan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan integrasi data, mempercepat layanan, dan memperkuat respons terhadap risiko.

Transformasi digital memberi kesempatan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk mengintegrasikan data pengawasan dari sampling, hasil uji laboratorium, pengawasan post-market, serta informasi dari fasilitas kesehatan dan pelaku usaha. Integrasi ini dapat mempercepat analisis risiko dan menghasilkan keputusan pengawasan yang lebih akurat dan responsif.

Selain itu, digitalisasi membuka peluang untuk memperluas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara digital, sehingga jangkauan edukasi masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih luas, cepat, dan konsisten dibandingkan metode konvensional. Sistem pelaporan online oleh pelaku usaha maupun masyarakat—termasuk pelaporan efek samping, produk ilegal, atau pelanggaran keamanan pangan—juga dapat menjadi sumber data penting yang memperkuat deteksi dini.

Balai Besar POM di Banjarbaru juga memiliki peluang untuk memanfaatkan dashboard kinerja digital yang menyajikan indikator pengawasan secara real-time. Dashboard ini dapat digunakan untuk memantau capaian kinerja, tren risiko, prioritas pengawasan, serta efektivitas tindak lanjut lintas bidang.

Di sisi hilir distribusi, pemanfaatan teknologi seperti Geographic Information System (GIS) dan sistem pelacakan distribusi produk memberi peluang besar untuk meningkatkan transparansi rantai

pasok, memetakan sebaran produk berisiko, dan mendeteksi lebih cepat potensi peredaran produk ilegal atau tidak memenuhi ketentuan.

Dengan memanfaatkan peluang digitalisasi ini secara konkret, Balai Besar POM di Banjarbaru dapat memperkuat efisiensi proses bisnis, meningkatkan kualitas pengawasan berbasis risiko, dan memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap tantangan pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Selatan.

3) Peran kuat media sosial dalam edukasi dan branding kinerja

Tingginya penetrasi media sosial di Kalimantan Selatan dengan mayoritas masyarakat menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube sebagai sumber utama informasi memberikan peluang strategis bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk menjadikan kanal resminya sebagai rujukan terpercaya terkait keamanan obat dan makanan. Melalui pemanfaatan media sosial, Balai dapat memperluas jangkauan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), menyebarkan peringatan cepat, serta menyampaikan klarifikasi resmi ketika muncul isu yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Selain memperkuat edukasi publik, media sosial membuka peluang untuk meningkatkan interaksi dua arah dalam bentuk pengaduan, laporan masyarakat, hingga respons cepat terhadap potensi kedaruratan keamanan pangan dan obat. Dengan memaksimalkan konten informatif, berbagi informasi secara real-time, dan membangun komunitas digital yang aktif, Balai Besar POM di Banjarbaru dapat memperkuat citra kinerja, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung sistem pengawasan berbasis partisipasi publik di wilayah Kalimantan Selatan.

4) Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Pertumbuhan industri makanan di Kalimantan Selatan—dengan 75.430 industri manufaktur makanan dan minuman dan lebih dari 185.000 tenaga kerja di sektor kecil dan menengah 2024 (Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025) —menjadi peluang besar bagi BBPOM di



Banjarbaru untuk memperluas jangkauan pembinaan dan pengawasannya. Banyaknya pelaku usaha makanan di kabupaten/kota, termasuk sentra UMKM yang berkembang, membuka ruang bagi Balai untuk memperkuat program pendampingan seperti Kayuh Baimbai UMKM Pangan OK, peningkatan KIE keamanan pangan, serta fasilitasi pemenuhan standar produksi yang baik.

Berkembangnya pasar lokal juga memberikan kesempatan bagi BBPOM di Banjarbaru untuk mendorong penerapan standar keamanan yang lebih ketat, baik melalui penerapan CPPOB, sertifikasi, maupun peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Dengan posisinya sebagai otoritas pengawasan, Balai Besar POM di Banjarbaru dapat menjadi mitra strategis bagi industri lokal untuk meningkatkan kualitas produk dan memperkuat daya saing, termasuk membuka peluang ekspor bagi pelaku usaha yang mampu memenuhi standar.

Pertumbuhan ini menempatkan Balai Besar POM di Banjarbaru pada posisi strategis untuk memastikan produk yang beredar aman serta mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif, sehingga memberikan manfaat ganda bagi konsumen, pelaku usaha, dan perekonomian daerah.

5) Sistem perizinan OSS yang terus berkembang dan memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha

Perkembangan sistem OSS RBA yang semakin terintegrasi membuka peluang besar bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Setiap tahun, ratusan pelaku usaha pangan melakukan proses perizinan yang tercatat dalam OSS. Model OSS memungkinkan Balai Besar POM di Banjarbaru mengakses data profil usaha, jenis produk, serta tingkat risiko sehingga dapat dimanfaatkan untuk risk profiling yang lebih akurat. Misalnya, pelaku usaha di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru (dua daerah dengan nilai investasi terbesar) dapat diprioritaskan dalam pemetaan risiko mengingat potensi ekspansi usaha dan distribusi produk yang semakin luas.

Integrasi OSS juga memberi peluang untuk mempercepat layanan publik yang membutuhkan validasi Balai Besar POM di Banjarbaru. Contoh spesifik: pendampingan UMKM, pelayanan pengujian pihak etiga dapat ditautkan langsung dengan data perizinan pelaku usaha di OSS, sehingga proses layanan permohonan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Selain itu, munculnya banyak izin usaha baru dari sektor makanan dan minuman membuka ruang bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk mengembangkan early warning system berbasis data OSS, misalnya memetakan pelaku usaha yang belum memiliki NIB tetapi sudah beroperasi, atau pelaku dengan produk Risiko Menengah-Rendah yang belum melakukan pemenuhan komitmen.

Dari sisi pembinaan, jumlah UMKM pangan yang besar di Kalimantan Selatan, terutama pada kabupaten dengan konsentrasi usaha makanan seperti Banjarmasin dan Banjarbaru memberikan peluang bagi Balai untuk memperluas program pendampingan keamanan pangan secara terarah. Melalui data OSS, Balai dapat mengidentifikasi UMKM yang baru mendapatkan NIB tetapi belum memahami persyaratan CPPOB atau label pangan, sehingga Balai dapat secara proaktif memberikan kelas daring, klinikal label, atau bimbingan teknis terjadwal berbasis daftar UMKM dari OSS.

Dengan memanfaatkan OSS sebagai ekosistem data terintegrasi, Balai Besar POM di Banjarbaru dapat memperkuat perannya sebagai otoritas teknis sekaligus mitra strategis pelaku usaha, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat pengawasan berbasis risiko secara lebih efisien.

6) Peningkatan kesadaran masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat di Kalimantan Selatan membuka peluang besar bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk memperkuat pengawasan partisipatif sebagai bagian dari early warning system yang lebih cepat dan efektif. Hasil survei efektivitas KIE menunjukkan bahwa indikator Pemahaman menjadi yang tertinggi, menandakan bahwa materi KIE yang sederhana, relevan, dan menarik sudah mampu



dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dengan basis pemahaman yang kuat ini, masyarakat memiliki potensi besar untuk berperan sebagai “mata dan telinga” Balai, khususnya dalam melaporkan dugaan produk berisiko melalui kanal pengaduan resmi, media sosial, atau kegiatan KIE.

Sebaliknya, indikator Minat yang masih rendah menunjukkan adanya peluang strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan memperbaiki konsep kegiatan, memperbarui isu dan materi sesuai tren obat dan makanan terkini, serta memperluas penggunaan media yang lebih interaktif dan digemari publik. Dengan peningkatan minat, partisipasi masyarakat dalam pelaporan produk ilegal, pangan berpotensi bahaya, atau kejadian terkait keamanan pangan akan meningkat, mendukung percepatan deteksi dini di lapangan.

Secara strategis, masyarakat yang semakin sadar dan proaktif akan menjadi komponen penting dalam membangun sistem pengawasan berbasis risiko yang responsif. Pelibatan aktif warga dapat mempercepat identifikasi masalah di wilayah peredaran produk, terutama di daerah dengan jangkauan pengawasan terbatas. Hal ini pada akhirnya memperkuat jejaring early warning, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta menegaskan posisi Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai lembaga pengawas yang adaptif dan dipercaya publik di Kalimantan Selatan.

7) Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas

Integrasi ekonomi global dan peningkatan perjanjian perdagangan bebas membuka peluang besar bagi BPOM, termasuk Balai Besar POM di Banjarbaru, untuk memperkuat perannya melalui harmonisasi regulasi dengan standar internasional. Penerapan standar global seperti Codex Alimentarius, GMP, dan standar harmonisasi ASEAN pada pangan, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik memberi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk dalam negeri.

Bagi Balai Besar POM di Banjarbaru, harmonisasi ini memberi peluang konkret untuk:

- a) mendorong UMKM pangan dan obat tradisional lokal memenuhi standar yang diakui internasional, sehingga dapat lebih kompetitif di pasar ekspor,
- b) menjadi mitra strategis industri dalam pendampingan pemenuhan standar global melalui pembinaan, bimbingan teknis, sampling terarah, dan evaluasi risiko,
- c) mengadopsi kebijakan global sebagai benchmark untuk meningkatkan kualitas pengawasan komoditi unggulan daerah (herbal, suplemen, pangan olahan),
- d) mengurangi hambatan teknis perdagangan melalui penerapan standar aditif pangan, keamanan pangan, dan persyaratan teknis lain yang telah diharmonisasikan di ASEAN.

Secara strategis, keterlibatan BPOM dalam berbagai mekanisme harmonisasi internasional memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Hal ini menciptakan peluang bagi produk lokal termasuk produk industri pangan dan obat tradisional Kalimantan Selatan untuk menembus pasar regional dan internasional dengan lebih mudah, sekaligus memastikan perlindungan konsumen dalam negeri melalui standar keamanan yang lebih kuat dan terukur.

8) Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Perkembangan produk kesehatan—mulai dari obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik berbahan baru, hingga pangan fungsional—memberi peluang besar bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam ekosistem inovasi daerah. Ketersediaan laboratorium pengujian, layanan konsultasi, dan pendampingan keamanan produk membuka ruang bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk mendukung percepatan hilirisasi inovasi lokal.

Di Kalimantan Selatan, peluang ini semakin nyata dengan adanya universitas dan pusat penelitian aktif, seperti ULM, Poltekkes, dan perguruan tinggi lainnya, yang rutin menghasilkan riset bahan alam



dan formulasi kosmetik/pangan. Melalui kemitraan riset, pendampingan pemenuhan standar (pre-GMP, klaim, keamanan bahan), hingga uji laboratorium tahap awal, Balai Besar POM di Banjarbaru dapat membantu mempercepat transformasi inovasi kampus menjadi produk komersial yang aman dan siap memasuki pasar.

Peluang ini juga memperkuat posisi Balai sebagai fasilitator inovasi daerah—mendorong UMKM dan peneliti untuk menghasilkan produk unggulan Kalimantan Selatan yang memenuhi standar nasional maupun internasional, sekaligus meningkatkan daya saing sektor kesehatan dan pangan fungsional di wilayah tersebut.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1) Maraknya Misinformasi dan Disinformasi Terkait Obat dan Makanan

Perkembangan media online dan media sosial yang sangat cepat memperkuat arus informasi yang tidak terkendali, termasuk meningkatnya penyebaran hoaks terkait obat, makanan, vaksin, zat berbahaya, serta isu-isu yang langsung menyeret nama BPOM. Konten provokatif seperti klaim palsu efek samping vaksin, informasi menyesatkan tentang bahan tambahan pangan, atau kabar bohong mengenai temuan produk berbahaya sering beredar tanpa proses verifikasi, terutama karena kemudahan akses smartphone dan budaya share before check di masyarakat.

Fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi Balai Besar POM di Banjarbaru. Penyebaran hoaks berpotensi menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap hasil pengawasan, memicu resistensi terhadap program pemerintah, serta menciptakan kepanikan atau misinformasi publik—misalnya kasus viral “makanan mengandung zat berbahaya” yang tidak berdasar. Selain itu, meningkatnya volume konten hoaks menyebabkan beban klarifikasi yang semakin besar bagi Balai, mengalihkan sumber daya dari tugas pengawasan inti dan memaksa Balai lebih reaktif dalam meredam isu.

Jika tidak ditangani secara sistematis, derasnya hoaks di ruang digital dapat mengganggu efektivitas edukasi KIE, melemahkan legitimasi lembaga, dan menghambat upaya memastikan keamanan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Selatan..

2) Rendahnya Kepatuhan dan Pemahaman terhadap Kebijakan Baru di Sektor Obat dan Makanan

Perubahan kebijakan nasional di sektor obat dan makanan berlangsung semakin cepat, namun tidak diikuti oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan yang memadai dari masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Rendahnya literasi regulasi ini menjadi ancaman serius bagi efektivitas implementasi kebijakan BPOM. Contohnya, penerapan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan CPPOB masih menghadapi tantangan signifikan. Hingga akhir 2024, tercatat 25 sarana produksi pangan olahan existing di Kalimantan Selatan belum memiliki Izin Penerapan CPPOB, padahal sertifikasi ini merupakan persyaratan wajib dalam proses izin edar pangan olahan. Rendahnya kepatuhan tersebut berdampak langsung pada terhambatnya pembaruan izin edar, potensi beredarnya produk yang belum memenuhi standar higienitas proses, serta meningkatnya risiko keamanan pangan bagi masyarakat.

Di sisi masyarakat, minimnya pemahaman mengenai urgensi keamanan produk dan kewajiban regulatori menyebabkan resistensi terhadap kebijakan baru, terutama yang dinilai membatasi pilihan atau meningkatkan persyaratan pembelian dan konsumsi obat maupun pangan. Di sisi industri, terutama UMKM pangan olahan, kebijakan baru sering dianggap sebagai beban tambahan yang memerlukan biaya,



penyesuaian proses produksi, hingga investasi peralatan. Gagap adaptasi ini berpotensi menyebabkan tingginya angka ketidakpatuhan, lambatnya proses penyesuaian, serta meningkatnya kebutuhan pendampingan teknis dari BBPOM di Banjarbaru.

Jika tidak dikelola dengan baik, kombinasi resistensi publik, rendahnya literasi regulasi, dan keterbatasan kapasitas pelaku usaha dapat menjadi ancaman terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Dampaknya antara lain meningkatnya beban pengawasan, perlunya intensifikasi edukasi, dan potensi turunnya efektivitas implementasi kebijakan nasional obat dan makanan. Oleh karena itu, isu rendahnya kepatuhan dan pemahaman ini harus menjadi fokus manajemen risiko strategis dalam pengembangan kebijakan dan program pengawasan BBPOM di Banjarbaru.

3) Persaingan produk Obat dan Makanan impor dan produk lokal

Arus globalisasi dan kebijakan perdagangan bebas memungkinkan produk obat dan makanan dari berbagai negara masuk dengan lebih mudah ke wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Keberadaan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebagai salah satu jalur distribusi barang terbesar di Kalimantan menjadi pintu masuk penting bagi aliran logistik nasional maupun internasional. Kemudahan akses barang impor, termasuk produk kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan, berpotensi membuat volume peredaran produk impor di Kalsel meningkat signifikan setiap tahun, sehingga memperkuat tekanan terhadap daya saing produk lokal, khususnya UMKM pangan olahan.

Situasi ini menjadi ancaman langsung bagi Balai Besar POM di Banjarbaru, terutama dalam aspek pengawasan dan pengendalian peredaran produk ilegal atau tanpa izin edar. Masuknya produk impor melalui jalur logistik formal maupun informal berpotensi meningkatkan:

Peredaran produk tanpa izin edar, termasuk suplemen, kosmetik, atau pangan impor yang tidak memenuhi standar keamanan.

Beban intensifikasi pengawasan di pelabuhan, gudang logistik, dan e-commerce, mengingat produk impor kini banyak beredar melalui platform digital.

Risiko meningkatnya produk yang tidak memenuhi persyaratan label (NKV, gizi, bahasa Indonesia) sehingga membingungkan konsumen dan melemahkan perlindungan masyarakat.

Selain itu, melonjaknya preferensi konsumen terhadap produk murah impor berdampak pada turunnya daya saing UMKM lokal, yang pada akhirnya menambah tantangan bagi BPOM dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha lokal. Jika tidak ditangani, kombinasi tingginya arus masuk produk impor, keterbatasan sumber daya pengawasan, dan persaingan yang tidak seimbang ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Selatan.

4) E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen di era Society 5.0 mendorong pergeseran signifikan dari transaksi konvensional menuju jual beli digital. Namun, kemudahan ini diikuti oleh meningkatnya risiko peredaran obat, kosmetik, dan pangan ilegal melalui platform e-commerce dan media sosial. Sistem user generated content memungkinkan siapa pun membuat akun dan menawarkan produk tanpa verifikasi memadai, sehingga membuka ruang bagi produk palsu, kedaluwarsa, mengandung bahan berbahaya, atau tidak memiliki izin edar untuk beredar luas dan cepat.

Bagi Balai Besar POM di Banjarbaru, fenomena ini menjadi ancaman strategis karena beban pengawasan bergeser dari fisik ke digital, membutuhkan kemampuan baru seperti pemantauan siber, deteksi jejak digital, dan kapasitas cyber forensics untuk mengidentifikasi pelaku dan memetakan rantai distribusi produk ilegal. Pengawasan digital juga menuntut sinergi erat dengan Kominfo, Kepolisian, Bea Cukai, serta platform e-commerce agar konten berbahaya dapat segera



diturunkan dan tindakan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.

Jika kapasitas pengawasan digital tidak diperkuat, risiko menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan produk, meningkatnya paparan masyarakat terhadap produk berbahaya, serta bertambahnya beban klarifikasi isu viral akan semakin tinggi—menjadikannya ancaman nyata bagi efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Selatan.

5) Potensi Krisis Kesehatan Global yang Membebani Sistem Pengawasan.

Krisis kesehatan global maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) — seperti pandemi, wabah pangan, atau peningkatan kasus keracunan — menjadi ancaman serius bagi Balai Besar POM di Banjarbaru karena memicu lonjakan kebutuhan pengujian laboratorium, intensitas pengawasan, serta klarifikasi informasi dalam waktu singkat. Permintaan yang tiba-tiba terhadap pemeriksaan obat, pangan, alat kesehatan, hingga sampel epidemiologis dapat menyebabkan overload kapasitas laboratorium dan memperpanjang waktu respons jika tidak dikelola dengan baik.

Di saat yang sama, situasi darurat biasanya meningkatkan risiko peredaran produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi mutu, serta ketidakstabilan rantai pasok obat dan pangan. Kondisi ini menuntut Balai untuk melakukan respons cepat, termasuk inspeksi mendadak, penindakan, pemantauan pasar, dan edukasi publik — sementara SDM, sarana laboratorium, serta logistik di daerah tetap terbatas.

Dengan tingginya kebutuhan koordinasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BNPB, Polri, dan pusat), Balai Besar POM di Banjarbaru menghadapi ancaman nyata berupa beban kerja yang meningkat drastis, potensi penurunan ketepatan pengujian dan pengawasan, serta meningkatnya risiko turunnya kepercayaan publik jika respons dianggap lambat. Tantangan ini menjadikan penguatan kapasitas

respons darurat sebagai keharusan strategis bagi Balai di masa mendatang.

6) Akselerasi perkembangan teknologi

Perkembangan pesat teknologi—khususnya bioteknologi, rekayasa genetik, dan nanoteknologi—memunculkan generasi baru produk obat, pangan, kosmetik, dan suplemen yang memiliki mekanisme kerja dan komponen yang belum tercakup dalam regulasi maupun metode uji konvensional. Situasi ini menjadi ancaman langsung bagi BPOM, termasuk Balai Besar POM di Banjarbaru, karena produk inovatif sering kali hadir lebih cepat daripada kemampuan regulasi dan laboratoris untuk menilai keamanan serta mutunya.

Tantangan ini menuntut kapasitas pengawasan yang jauh lebih maju: upgrade metode uji laboratorium, peningkatan peralatan berteknologi tinggi, serta penguatan literasi ilmiah SDM agar tidak tertinggal oleh inovasi industri. Tanpa peningkatan kompetensi dan metode uji yang mengikuti perkembangan ilmiah, terdapat risiko bahwa produk berbasis bioteknologi atau nano akan masuk ke pasar tanpa penilaian risiko yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian keamanan bagi masyarakat.

Selain itu, lambatnya adaptasi pengawasan dapat menurunkan kepercayaan publik, mempersulit penegakan kepatuhan industri, serta memperbesar risiko “regulatory lag”—di mana regulasi dan kemampuan laboratorium tertinggal dibanding inovasi industri. Jika tidak diantisipasi, disrupsi teknologi ini dapat melemahkan efektivitas Balai dalam menjamin keamanan produk dan dalam jangka panjang dapat mengurangi kredibilitas BPOM sebagai otoritas pengawasan obat dan makanan.

7) Keterbatasan Dukungan Pemerintah Daerah dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

Ketersediaan SDM daerah yang berperan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif masih sangat terbatas, jauh dari kebutuhan ideal untuk mendukung kolaborasi pengawasan obat dan



makanan hingga level kabupaten/kota. Keterbatasan ini diperburuk oleh dinamika rotasi dan mutasi jabatan di pemerintah daerah, sehingga SDM yang telah ditetapkan sebagai PFM sering dipindahkan ke tugas lain yang tidak relevan dengan fungsi pengawasan obat dan makanan. Akibatnya, efektivitas kolaborasi pengawasan di daerah menjadi tidak optimal dan dapat menimbulkan kesenjangan pengawasan di wilayah yang memiliki risiko tinggi.

Selain itu, penguatan peran PFM Inklusif memerlukan komitmen kuat dari instansi daerah, sementara dukungan kebijakan dari lintas sektor di tingkat pusat — termasuk BKN dan Kementerian Dalam Negeri — masih terbatas. Tanpa kebijakan yang memungkinkan penambahan formasi Jabatan Fungsional PFM di daerah, BPOM menghadapi ancaman berkelanjutan berupa keterbatasan kapasitas eksternal, yang dapat menghambat perluasan cakupan pengawasan, memperlambat respons terhadap pelanggaran, dan melemahkan posisi strategis BPOM dalam memastikan keamanan obat dan makanan hingga ke daerah terpencil.

Tabel 1. 4. Matriks Ringkasan Analisis SWOT

<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko	1. Manajemen SDM yang belum optimal
2. Infrastruktur dan Fasilitas Laboratorium yang Memadai	2. Optimalisasi Diseminasi Informasi dan Citra Lembaga melalui Media Digital Masih Terbatas
3. Infrastruktur Pelayanan Publik yang Terstandar dan Mendukung Tugas Pengawasan	3. Terbatasnya jangkauan wilayah pengawasan pre market dan post market
4. Komitmen kepemimpinan yang kuat	4. Pembangunan digital mindset dan transformasi digital yang belum optimal
5. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM	5. Layanan perizinan

6. Tersedianya e-office yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas 7. Edukasi dan pemberdayaan Masyarakat	6. Sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (early warning) belum terintegrasi
Opportunities	Threats
1. Koordinasi dan kolaborasi yang solid dengan stakeholder 2. Transformasi digital dalam pelayanan publik dan digitalisasi proses bisnis 3. Peran kuat media sosial dalam edukasi dan branding kinerja 4. Pertumbuhan pasar dan peningkatan daya saing industri/produk Obat dan Makanan dalam negeri. 5. Sistem perizinan OSS yang terus berkembang dan memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha 6. Peningkatan kesadaran masyarakat 7. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas 8. Inovasi produk dan layanan kesehatan	1. Maraknya Misinformasi dan Disinformasi Terkait Obat dan Makanan 2. Rendahnya Kepatuhan dan Pemahaman terhadap Kebijakan Baru di Sektor Obat dan Makanan 3. Persaingan produk Obat dan Makanan impor dan produk lokal 4. E-Commerce dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan 5. Potensi Krisis Kesehatan Global yang Membebani Sistem Pengawasan 6. Akselerasi perkembangan teknologi 7. Keterbatasan dukungan Pemerintah Daerah dan dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

Dari identifikasi isu-isu strategis, baik internal maupun eksternal maka pijakan strategi yang digunakan dalam mencapai sasaran strategis Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Strategi S-O:

- 1) Optimalisasi peran SDM Balai Besar POM di Banjarbaru untuk meningkatkan sinergitas dengan stakeholder dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di daerah
- 2) Peningkatan efektivitas transformasi digital dan digitalisasi proses bisnis dalam pelayanan publik serta branding kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru
- 3) Perkuatan pengembangan inovasi dan teknologi laboratorium Balai Besar POM di Banjarbaru dalam rangka pemastian mutu dan keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan

Strategi W-O:

- 1) Optimalisasi kualitas pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan daya saing industri/produk sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri
- 2) Peningkatan pemanfaatan proses bisnis digital dalam menjangkau wilayah kerja pengawasan pre market dan post market yang terbatas

Strategi S-T:

- 1) Peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi melalui pemberdayaan masyarakat
- 2) Peningkatan efektivitas pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Strategi W-T:

- 1) Menggerakkan SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru untuk mewujudkan akselerasi digital dan perkembangan teknologi dalam upaya pengawasan pre market dan post market
- 2) Optimalisasi edukasi dan penanganan hoax Sediaan Farmasi dan Makanan melalui social media

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi

Balai Besar POM di Banjarbaru sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:

Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.



2) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:

BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:

BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

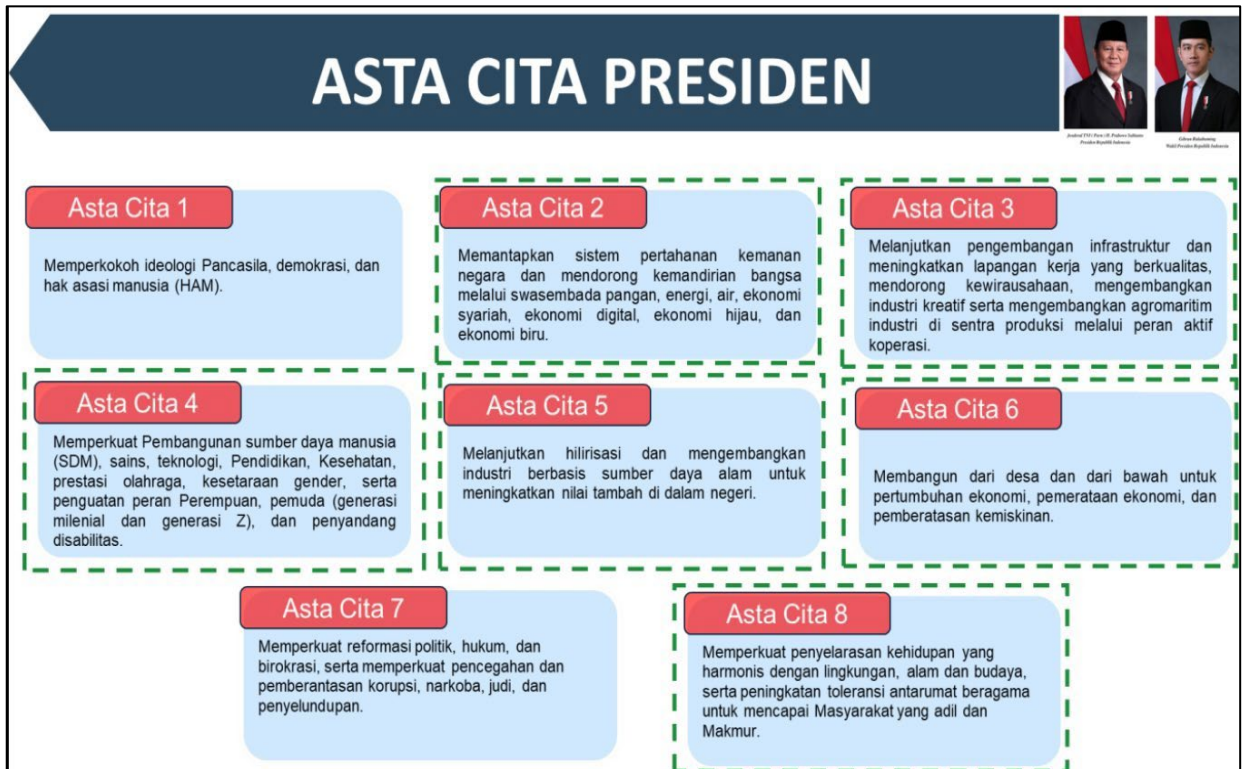
4) Masyarakat Sehat dan Sejahtera:

Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

Balai Besar POM di Banjarbaru sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM yang disusun dengan memperhatikan 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1. Misi Presiden (Asta Cita)

Dari Asta Cita Presiden tersebut, BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Misi BPOM tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

Balai Besar POM di Banjarbaru berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta memperkuat penindakan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor



sediaan farmasi dan pangan olahan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan. Misi ini menegaskan pentingnya pengawasan yang komprehensif guna menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam pelaksanaannya, Balai Besar POM di Banjarbaru mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi industri, komunitas masyarakat, serta sektor swasta melalui program CSR. Pendekatan kolaboratif ini menjadikan pengawasan lebih terpadu, responsif, dan berbasis risiko, sehingga proses pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur. Sinergi seluruh pihak inilah yang menjadi fondasi terciptanya sistem pengawasan obat dan makanan yang kuat, adaptif, dan terpercaya di Kalimantan Selatan.

2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

Balai Besar POM di Banjarbaru tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi dunia usaha dalam memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan berdaya saing. Melalui kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi, dan pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Balai Besar POM di Banjarbaru aktif mendukung pelaku UMKM dan industri lokal agar mampu memenuhi standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan. Pendekatan pembinaan yang komunikatif dan berbasis risiko ini tidak hanya memperkuat kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing di Kalimantan Selatan. Dengan sinergi antara fungsi pengawasan dan pemberdayaan, Balai Besar POM di Banjarbaru berkontribusi langsung dalam membangun struktur ekonomi daerah yang lebih tangguh, produktif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

3) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memegang peran penting dalam menjaga keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Banjarbaru berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Selatan. Melalui berbagai program seperti Gerakan Keamanan Pangan Desa, Pasar Aman, serta edukasi lintas sektor bersama sekolah dan pemerintah daerah, Balai Besar POM di Banjarbaru membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat peran masyarakat sebagai mitra pengawasan.

Dengan pendekatan edukatif dan pemberdayaan yang berkelanjutan, masyarakat didorong untuk menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis, sehingga pengawasan obat dan makanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen masyarakat Kalimantan Selatan.

4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai perpanjangan tangan Badan POM di wilayah Kalimantan Selatan, Balai Besar POM di Banjarbaru menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Melalui penerapan sistem kerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, Balai Besar POM di Banjarbaru berupaya memastikan setiap layanan publik berjalan efektif dan berintegritas.

Besar POM di Banjarbaru juga terus berinovasi dalam pelayanan publik, baik melalui transformasi digital layanan perizinan dan pengujian, maupun pelayanan tatap muka yang efisien dan berstandar tinggi. Upaya tersebut dibuktikan dengan capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat yang konsisten



berada pada kategori sangat baik. Dengan birokrasi yang bersih, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, Balai Besar POM di Banjarbaru hadir sebagai lembaga pengawasan yang tegas, sekaligus mitra layanan publik yang cepat, tepat, dan terpercaya bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Selatan

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1) **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- 2) **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

- 3) **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- 4) **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5) **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai Besar POM di Banjarbaru sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM, yang secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut.:



Tabel 2. 1. Indikator Tujuan Badan POM dan Target Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarbaru, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarbaru akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

2.4.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a) Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c) Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan



- d) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p) Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2.4.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan

berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

2.4.3 Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b) Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c) Jumlah desa pangan aman
- d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

2.4.4 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase



UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

2.4.5 Sasaran Kegiatan 5 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

2.4.6 Sasaran Kegiatan 6 : Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

2.4.7 Sasaran Kegiatan 7 : Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

2.4.8 Sasaran Kegiatan 8 : Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b) Nilai AKIP UPT BPOM
- c) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM



Tabel 2. 2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Banjarbaru periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> <i>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> <i>2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> <i>3. Jumlah desa pangan aman</i> <i>4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banjarbaru 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai Besar POM di Banjarbaru untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam tabel :

Tabel 2. 3. . Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Kegoatan BBPOM di Banjarbaru Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Hasil pengujian tidak valid, hasil uji profisiensi outlier yang disebabkan oleh alat yang tidak dikalibrasi	Melakukan perencanaan kalibrasi alat	Fungsi Pengujian
		Timeline pengujian tidak tercapai yang disebabkan oleh Alat yang rusak, reagen yang tidak tersedia dan baku pembanding yang tidak tersedia	Melakukan pengajuan perbaikan alat, membuat perencanaan pengadaan reagen dengan baik, melakukan monitoring stok baku pembanding, melakukan peminjaman reagen dengn balai yang lain	Fungsi Pengujian
		Pelaporan hasil pengujian SIPT tidak tepat waktu yang disebabkan oleh Terlambatnya pengisian data dari poksi lain/balai regional di SIPT	Evaluasi pengisian data SIPT Regionalisasi Laboratorium	Fungsi Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Hasil pengujian tidak valid, hasil uji profisiensi outlier yang disebabkan oleh alat yang tidak dikalibrasi	Melakukan perencanaan kalibrasi alat	Fungsi Pengujian
		Timeline pengujian tidak tercapai yang disebabkan oleh Alat yang rusak, reagen yang tidak tersedia dan baku pembanding yang tidak tersedia	Melakukan pengajuan perbaikan alat, membuat perencanaan pengadaan reagen dengan baik, melakukan monitoring stok baku pembanding, melakukan peminjaman reagen dengan balai yang lain	Fungsi Pengujian
		Pelaporan hasil pengujian SIPT tidak tepat waktu yang disebabkan oleh Terlambatnya pengisian data dari poksi lain/balai regional di SIPT	Evaluasi pengisian data SIPT Regionalisasi Laboratorium	Fungsi Pengujian
		Keterlambatan penyelesaian pengujian sampel KLB yang disebabkan oleh Lonjakan jumlah	Tersedianya SOP penanganan untuk sampel KLB; Menyusun daftar usulan	Fungsi Pemeriksaan / Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		sampel KLB secara tiba-tiba dan keterbatasan media atau reagen untuk parameter KLB	pengadaan media atau reagen khusus KLB; Tersedianya Tim KLB	
		Kesesuaian parameter uji tidak terpenuhi karena hanya dilakukan pengujian parameter wajib dan tidak menambahkan parameter pilihan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman penguji terhadap Pedoman Prioritas Sampling sehingga dikarenakan Beban kerja tinggi sehingga penguji memilih parameter wajib saja dan hal ini juga diperkuat karena Penghematan penggunaan reagen, pereaksi, dan media yang ketersediaannya terbatas karena pengadaannya mengalami efisiensi	Dilakukan kaji ulang permintaan uji oleh ketua tim; Telaah bertingkat dari penguji, penyelia dan ketua tim agar untuk sampel yang hanya memiliki parameter wajib kurang dari 3 agar dapat menambah parameter pilihan agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pedoman Prioritas Sampling	Fungsi Pengujian
		Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha yang	1. Melakukan monitoring timeline CAPA dari pelaku usaha;	Fungsi Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		disebabkan oleh Surat keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang tidak diterima oleh pelaku usaha; dan Pelaku usaha yang tidak memahami bagaimana cara menindaklanjuti Keputusan / rekomendasi hasil pengawasan	2. Penunjukan Ketua Tim sebagai petugas monitoring dan evaluasi jumlah feedback CAPA dari pelaku usaha; 3. Melaksanakan Sosialisasi dan Desk CAPA Pelaku Usaha	
		Pembuatan surat tindak lanjut/ rekomendasi hasil pemeriksaan tidak sesuai timeline yang ditetapkan yang disebabkan oleh Renlak pemeriksaan yang cukup padat; tidak ada alokasi waktu pembuatan surat tindak lanjut; dan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan / rekomendasi belum optimal	1. Mengatur jadwal pemeriksaan sarana dan mengalokasikan hari Jumat untuk petugas membuat surat tindak lanjut/ rekomendasi hasil pemeriksaan; 2. Melakukan monitoring timeline penerbitan surat tindak lanjut/ rekomendasi hasil pemeriksaan	Fungsi Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT tidak sesuai timeline yang disebabkan oleh pelaporan di SIPT yang belum dilakukan dengan tertib	Melakukan monitoring pemenuhan timeline pelaporan SIPT	Fungsi Pemeriksaan
		Pemenuhan ruang lingkup Kompetensi Personel Laboratorium terhambat yang disebabkan oleh tema pelatihan/bimtek dari PPPOMN yang belum mengakomodir kebutuhan pemenuhan ruang lingkup kompetensi personel	Pengajuan usulan pelatihan internal di Balai Besar POM di Banjarbaru kepada PPPOMN Badan POM RI	Fungsi Pengujian
		Pelaksanaan hasil pengisian Tools Penilaian Mandiri Kab/Kota pangan aman tidak mendapatkan nilai yang ditargetkan yaitu > 60 yang disebabkan oleh kurangnya data dukung pada pengisian tools penilaian mandiri pendek yang melibatkan berbagai instansi dan lintas OPD terkait, karena keterbatasan SDM, tenaga dan waktu dari instansi yang ditunjuk sebagai PIC	Existing Control : Melakukan koordinasi dan pendampingan secara daring terhadap PIC pemerintah daerah yang menjadi locus penilaian RTP : Melaksanakan advokasi terhadap seluruh pemerintah daerah dan pendampingan intensif secara tatap	Fungsi Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			muka / jemput bola terhadap PIC pemerintah daerah yang menjadi locus penilaian secara berkala	
		Pengujian sampel MBG memerlukan waktu uji yang lama dikarenakan ketersediaan kit pengujian cepat tidak mencukupi sehingga pengujian sampel MBG dilakukan dengan metode konvensional yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah kit pengujian cepat untuk parameter uji sampel MBG, masa guna kit pengujian yang pendek karena waktu expired kit yang cepat, dan jumlah sampel MBG yang masuk ke Laboratorium tidak sesuai dengan perencanaan sampling	Menyusun daftar usulan pengadaan media atau reagen kit pengujian cepat untuk sampel MBG; Pengadaan media atau reagen kit pengujian cepat dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan tanggal expired date kit tersebut; dan koordinasi antara poksi pengujian dengan poksi pemeriksaan mengenai perencanaan sampling sampel MBG	Fungsi Pemeriksaan / Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Penguji mengalami kecelakaan kerja karena Kurangnya pengetahuan penguji tentang K3 dan fasilitas penunjang K3 sehingga mengakibatkan penguji mengalami cedera fisik, penyakit kronis/jangka panjang	Melakukan sosialisasi penerapan IK Penangann K3 di dalam laboratorium	Fungsi Pengujian
		Gratifikasi dan atau suap oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh Kurangnya integritas petugas sehingga mengakibatkan temuan audit Inspektorat & BPK; Reputasi instansi menjadi buruk	Melakukan sosialisasi SOP Pengendalian Internal Personel dan Penandatanganan Pakta Integritas	Fungsi Pengujian
		Bocornya informasi hasil uji ke pihak yang tidak berkepentingan karena kurangnya integritas petugas dalam menjaga kerahasiaan hasil uji dan atau adanya ancaman dari produsen sehingga	Melakukan sosialisasi SOP Pengendalian Internal Personel, sosialisasi SOP Perlindungan Kerahasiaan Informasi dan Penandatanganan Pakta Integritas	Fungsi Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		mengakibatkan reputasi organisasi dipertanyakan oleh masyarakat, menimbulkan opini masyarakat		
		Bocornya informasi milik laboratorium kepada pihak yang tidak berwenang yang disebabkan oleh pengunjung yang melakukan aktivitas di dalam laboratorium (misal Teknisi, peserta magang) dan mengambil data tanpa izin sehingga mengakibatkan reputasi organisasi yang dipertanyakan oleh masyarakat	Pengunjung menandatangani Surat Pernyataan pengunjung laboratorium terkait Perlindungan kerahasiaan informasi laboratorium	Fungsi Pengujian
		Penguji memanipulasi hasil uji karena terdapat hubungan afiliasi antara penguji dengan pihak terkait lainnya sehingga mengakibatkan hasil uji tidak valid / tidk dapat dipertanggungjawabkan	Menandatangani Pakta Integritas serta melaksanakan inovasi SIAP GRAK terkait benturan kepentingan	Fungsi Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Kecelakaan kerja tidak dapat tertangani dengan baik karena tidak berfungsinya alat pengaman darurat di Laboratorium sehingga mengakibatkan penguji mengalami cedera fisik, penyakit kronis/jangka panjang	Melakukan pemantauan berkala terhadap alat pengaman darurat (APAR dan emergency shower), ketersediaan APD, ketersediaan barang di kotak P3K dan pemantauan kecelakaan kerja di dalam laboratorium	Fungsi Pengujian
		Realisasi sampel yang tidak sesuai dengan target pada rencana pelaksanaan bulanan sampling yang disebabkan oleh ketersediaan produk yang disampling di sarana di Kabupaten tertentu terbatas sehingga mengakibatkan timeline pengiriman sampel ke TPS tidak dapat terpenuhi	Meng-update data sampel dan sarana tempat sampling per kabupaten/ Kota yang sesuai dengan kaidah sampling acak dan targetted sehingga kegiatan sampling dapat terpenuhi baik dari segi jumlah, kesesuaian terhadap renlak dan sesuai dengan pedoman sampling yang ditetapkan	Fungsi Pemeriksaan
		Petugas memanipulasi hasil pemeriksaan sarana karena adanya Conflict of Interest (Benturan Kepentingan : Hubungan baik, relasi,	1. Pelaporan potensi benturan kepentingan melalui aplikasi Sang Integritas	Fungsi Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		persaudaraan) sehingga mengakibatkan hasil pemeriksaan bias dan tidak dapat dipertanggungjawabkan	2. Menugaskan petugas pemeriksaan yang tidak memiliki potensi benturan kepentingan dengan sarana	
		Gratifikasi ilegal yang diterima petugas pengawas dalam upaya meniadakan temuan dan memperlancar perizinan yang disebabkan oleh kurangnya integritas petugas pemeriksaan, ketidakpahaman pelaku usaha untuk tidak memberikan gratifikasi kepada petugas sehingga mengakibatkan reputasi instansi buruk, sarana produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tidak teridentifikasi, penjaminan mutu dan keamanan produk tidak terjamin	Inovasi SIAP GRAK 1. Peringatan tidak menerima gratifikasi pada surat tugas; 2. Penggunaan PIN antigratifikasi pada saat pemeriksaan dan pelayanan publik; 3. Penanda-tanganan pakta integritas untuk semua pegawai	Fungsi Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Waktu penyelesaian uji sampel nappza dari kepolisian dinilai lambat, yaitu 3 hari kerja yang disebabkan oleh belum adanya inovasi untuk meningkatkan kinerja terkait pengujian sampel nappza dari kepolisian sehingga mengakibatkan penurunan tingkat kepuasan pengguna/ penerima layanan	Dibuat inovasi khusus untuk pengujian sampel nappza dari kepolisian, yang waktu penyelesaiannya adalah 1x24 jam (identifikasi metamfetamin dan MDMA), yaitu Inovasi Fase 24 (Fast Service 24 Jam)	Fungsi Pengujian
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Tidak tercapainya jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang disebabkan oleh data sarana tidak update, jadwal pemeriksaan tidak bersamaan dengan jadwal sampling pangan fortifikasi sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemeriksaan tidak bisa disertai dengan proses sampling pangan fortifikasi	Penyusunan renlak dengan menyamakan jadwal pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dengan sampling pangan	Fungsi Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan, aman sehingga kurang peduli akan risiko kesehatan yang ditimbulkannya yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan publikasi Obat dan Makanan di masyarakat luas	Melakukan sosialisasi dan publikasi Obat dan Makanan baik langsung maupun melalui berbagai media, seperti pameran, media cetak, media sosial	Fungsi Infokom
		Pelaksanaan tahapan-tahapan program Tepadu Pembudayaan Keamanan Pangan di Sekolah (PJAS) tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara tim BBPOM di Banjarbaru dengan Pemda dan lintas sektor, terkait pelaksanaan kegiatan	Melakukan koordinasi intens dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan tahapan kegiatan Pembudayaan keamanan pangan di sekolah	Fungsi Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Pelaksanaan tahapan-tahapan program Tepadu Desa Pangan Aman tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara tim BBPOM di Banjarbaru dengan Pemda dan lintas sektor, terkait pelaksanaan kegiatan	Melakukan koordinasi intens dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan tahapan kegiatan Desa Pangan Aman	Fungsi Infokom
		Pelaksanaan tahapan-tahapan program Tepadu Pasar Aman Berbasis Komunitas tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara tim BBPOM di Banjarbaru dengan Pemda dan lintas sektor, terkait pelaksanaan kegiatan	Melakukan koordinasi intens dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan tahapan kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas	Fungsi Infokom
		Timbulnya bahaya bagi petugas kegiatan Kerling yang beraktivitas di atas kelotok/perahu karena belum tersedianya alat pengaman bagi petugas sehingga mengakibatkan petugas mengalami bahaya pada saat pelaksanaan kegiatan	1. Mengajukan pengadaan alat pengaman pelampung 2. Kelotok/perahu yang digunakan kondisi baik dan layak beroperasi	Fungsi Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Realisasi pelaksanaan advokasi lintas sektor tidak sesuai rencana pelaksanaan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara tim BBPOM di Banjarbaru dengan Pemda dan lintas sektor, terkait pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan kegiatan tidak terlaksana tepat waktu	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait Rencana pelaksanaan tahapan kegiatan Program Prioritas Nasional di kabupaten/ kota	Fungsi Infokom
		Beredarnya berita hoax atau isu yang simpang siur kebenarannya di masyarakat seputar penggunaan atau pengawasan obat dan makanan yang disebabkan oleh kurangnya literasi informasi terkait Obat dan Makanan di masyarakat luas dan adanya manipulasi informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga mempengaruhi opini publik sehingga mengakibatkan pelayanan informasi publik belum optimal dan banyak masyarakat yang terpengaruhi berita/isu yang	Pelaksanaan Inovasi Video Informasi dan Edukasi Dusta atau Nyata (VISI DU/NYA)	Tim Medsos

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		tidak benar terkait penggunaan maupun pengawasan obat dan makanan		
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pemenuhan tindakan perbaikan dan pencegahan / CAPA pada proses pemberian rekomendasi/ sertifikasi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional yang tidak tepat waktu/melewati timeline yang disebabkan oleh pendampingan UMKM dalam pemenuhan CAPA yang menggunakan media/pesan elektronik (whatsapp) sehingga tidak efektif dibanding dengan penyampaian informasi secara langsung/tatap muka/Zoom Meeting	Penyelenggaraan Bimtek/Desk CAPA bagi UMKM	Fungsi Pemeriksaan
		Terdapat industri pangan existing yang tidak melakukan pengurusan Izin Penerapan CPPOB yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan ketidaktahuan industri pangan existing terkait kewajiban penerapan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun	Existing Control : Pelaksanaan sosialisasi kepada industri pangan existing yang belum memiliki Izin Penerapan CPPOB baik melalui media sosial maupun saat melakukan pendampingan/ pembinaan kepada	Fungsi Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pembaharuan izin edar	Industri pangan olahan RTP : Petugas sertifikasi melakukan pendataan dan melakukan proses pendampingan (Petugas kelompok Substansi Sertifikasi melakukan pendataan pelaku usaha existing dalam pengawasan BBPOM di Banjarmasin dan melakukan pendataan Industri existing yang belum mempunyai Sertifikat IP CPPOB. Dari data yang ada akan dibuat kajian resiko untuk dimasukkan dalam target pendampingan untuk mendapat IP CPPOB atau NIE pada tahun 2025. Dari 27 Industri yang belum mempunyai IP CPPOB diharapkan pada tahun berjalan dapat mempunyai akun	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			IP CPPOB atau terbit sertifikat IP CPPOB)	
		Adanya keluhan dari UMKM yang kesulitan dalam mengakses pendaftaran untuk mendapatkan pendampingan pemenuhan standar keamanan dan mutu yang disebabkan oleh terbatasnya media/wadah penjangkaran UMKM yang memerlukan pendampingan dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sehingga mengakibatkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat	Inovasi Ganii UMKM	Fungsi Pemeriksaan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penanganan perkara (perkara tidak selesai/carry over) yang disebabkan oleh tidak optimalnya koordinasi lintas sektor Criminal Justice System dengan Kejaksaan dan/atau Kepolisian	1. Inovasi BAP TWO (Mengintensifkan koordinasi dengan lintas sektor dalam lingkup Criminal Justice System terutama dengan Kejaksaan dan/atau Kepolisian dalam setiap tahap penanganan perkara);	Fungsi Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			2. Monev penyelesaian penanganan perkara	
		Kegiatan atau upaya paksa yang dilakukan oleh petugas tidak sah di mata hukum dan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh Administrasi kegiatan yang tidak lengkap dan kesalahan prosedur / pengambilan keputusan dalam kegiatan operasi penindakan/penyidikan sehingga mengakibatkan petugas mengalami penuntutan praperadilan dan/atau penuntutan perbuatan melawan hukum	1. Melaksanakan kegiatan penindakan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkoordinasi dengan Korwas PPNS dalam pelaksanaan kegiatan atau upaya paksa. 3. Melakukan gelar kasus atau gelar perkara dalam memutuskan tindak lanjut penanganan kasus, penetapan tersangka, dan SP3	Fungsi Penindakan
		Desepsi/pengelabuan dan cover/penyamaran yang dilakukan oleh petugas terbongkar atau	Menjalankan tugas sesuai dengan SOP, Mentoring dan pemberian penugasan	Fungsi Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		diketahui oleh target/lingkungan target yang disebabkan oleh petugas yang belum memiliki kompetensi dalam penerapan teknik dan taktik intelijen yang benar sehingga mengakibatkan adanya ancaman atau intimidasi baik secara fisik (cedera ringan hingga kematian) maupun psikis dari orang-orang di sekitar lingkungan target operasi intelijen kepada petugas intelijen yang belum mengikuti diklat intelijen dasar	kepada petugas yang belum mengikuti Diklat Intelijen Dasar Sosialisasi SOP tentang Intelijen	
		Gratifikasi petugas PPNS dan Tim Penindakan oleh Tersangka/Terduga pelaku Tindak Pidana karena kurangnya integritas petugas dan minimnya pengetahuan pihak eksternal tentang larangan gratifikasi terhadap petugas tim penindakan dan/atau PPNS Balai Besar POM di Banjarbaru sehingga mengakibatkan Temuan audit Inspektorat dan BPK; Reputasi instansi menjadi buruk	Melaksanakan gelar kasus atau gelar perkara dalam menetapkan setiap keputusan tindak lanjut kasus (PJ / Non PJ), Penetapan Tersangka, maupun penghentian penyidikan (SP3). Pelaksanaan WBS, Pakta integritas, Inovasi SOLID	Fungsi Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Tidak tersedianya / terlambatnya penyampaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hingga batas waktu yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh tidak adanya penunjukan penanggung jawab / operator dan monitoring penyelesaian dan penyampaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala	Melaksanakan penunjukan penanggung jawab / operator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; Melaksanakan monitoring penyelesaian dan penyampaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Fungsi Penindakan
		Petugas tidak memiliki akses terhadap informasi pengiriman Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Ilegal yang dilakukan melalui perantara penyedia jasa pengiriman barang yang disebabkan oleh tidak tersedianya jaringan informasi pada titik-titik potensial masuknya sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal sehingga mengakibatkan keterlibatan lintas sektor dalam pengumpulan bahan keterangan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal sangat minim	Inovasi MATA BABE	Fungsi Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Masyarakat di daerah tepi sungai dan pasar terapung masih banyak yang tidak mengetahui informasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman karena pelaksanaan KIE belum menargetkan masyarakat yang tinggal di daerah tepi sungai dan beraktivitas di pasar terapung sebagai sasaran KIE sehingga mengakibatkan pelayanan informasi publik yang belum optimal	Melaksanakan inovasi Kelotok Laboratorium Keliling (Kerling) dengan target KIE-nya adalah masyarakat yang tinggal di daerah tepi sungai dan penjual pangan yang beraktivitas di pasar terapung	Fungsi Infokom
		Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tentang Obat dan Makanan tidak sesuai time line yang telah ditetapkan sesuai SOP yang disebabkan oleh belum tersosialisasikannya SOP penanganan pengaduan serta perlunya pemahaman petugas bidang yang menangani tindak lanjut pengaduan terkait prioritas aduan (High Risk)	Mensosialisasikan SOP pengaduan terkait time line tindak lanjut pengaduan dan melakukan monev dengan berkoordinasi dengan bidang terkait yang menindaklanjuti aduan; Melakukan pengawalan terhadap proses tindak lanjut dari pengaduan	Fungsi Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Petugas layanan belum memberikan respon cepat dalam pelayanan kepada masyarakat karena belum optimalnya pemanfaatan media pengaduan sehingga mengakibatkan masyarakat yang kurang puas akan pelayanan yang diberikan	- mengoptimalkan penggunaan media pengaduan seperti kotak saran - mensosialisasikan media pengaduan melalui pemasangan light box di ruang layanan, publikasi di media sosial di koran, videotron, baliho	Fungsi Infokom
		Penumpukan sampah plastik di sekitar area kantor yang sulit terurai secara alami yang disebabkan oleh Tingginya penggunaan produk konsumsi sekali pakai yang berbahan kemasan plastik oleh karyawan kantor pada saat jam kerja sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar area kantor, menurunnya kesehatan masyarakat, dan terhambatnya akses layanan publik	Pembentukan Satgas LH; himbauan penggunaan tumbler pada saat kegiatan internal; dan pemilahan sampah plastik	Bagian Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP tidak optimal karena belum mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan; belum adanya keselarasan penyajian target kinerja antara RAPK, RHPK, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim; dan belum disajikannya monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya	Existing Control : Menyediakan matriks RHPK/RAPK untuk pengumpulan data; Menyampaikan timeline pengumpulan dan pelaporan; Existing Control : Menginput target kinerja pada aplikasi Simetris e-planning dan Matriks RHPK/RAPK; Menyampaikan format pelaporan yang sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SAKIP; RTP : Ketua Tim masuk sebagai anggota dalam IKU Nilai AKIP; Sosialisasi pengisian RAPK, RHPK, laporan evaluasi internal dan interim, serta pengisian monitoring atas rekomendasi tindak lanjut sebelumnya	Tim SAKIP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Nilai Deviasi halaman III DIPA melebihi ambang batas karena tidak adanya monitoring Rencana Penarikan Dana dan Realisasi anggaran serta tindak lanjut jika nilai deviasi melebihi ambang batas	Melakukan monitoring deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran sebelum cut off penarikan data setiap akhir bulan dan melakukan penyesuaian pembayaran jika $RPD < \text{Realisasi Anggaran}$ atau berkoordinasi dengan pengelola kegiatan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran jika $RPD > \text{Realisasi Anggaran}$	Bagian Tata Usaha
		Tindak lanjut penanganan kelemahan berdasarkan hasil penilaian maturitas penerapan manajemen risiko yang tidak tuntas disebabkan oleh tidak tersedianya rencana aksi dan penetapan personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan kelemahan berdasarkan hasil penilaian maturitas penerapan manajemen risiko	Existing Control : Menetapkan Tim SPI dan Pengelola Manajemen Risiko UPT; melakukan rapat pembahasan identifikasi risiko yang dihadiri oleh Kepala UPT dan seluruh pegawai minimal 1 tahun sekali RTP : Melaksanakan reviu dan/atau	Tim MR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			pemantauan secara berkala / saat ada usulan perubahan daftar risiko; Menetapkan rencana aksi, Implementasi, dan monitoring penanganan kelemahan berdasarkan hasil penilaian maturitas penerapan manajemen risiko	
		Daftar Barang Ruangan tidak update yang disebabkan oleh Perpindahan barang antar ruangan yang tidak dilaporkan kepada petugas BMN sehingga mengakibatkan Daftar Barang Ruang tidak diyakini kebenarannya, BMN tidak dapat ditelusur dengan baik	1. Membuat form BA pelaporan perpindahan barang ke pengelola BMN; 2. Membuat BAST kepada penanggung jawab/pemegang BMN; 3. Melakukan inventarisasi Barang Milik Negara secara berkala / segera jika telah mendapatkan laporan perpindahan BMN; 4. Sosialisasi dengan stiker mengenai pelaporan perpindahan barang ruangan untuk dilakukan DBR ulang	Bagian Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Barang rusak berat yang sudah diserahkan ke pengelola BMN tidak terdeteksi keberadaannya karena Tidak adanya bukti serah terima BMN dari pengguna ke pengelola BMN sehingga mengakibatkan BMN menjadi tidak tertelusur	Membuat form BAST dari pengguna/PJ BMN ke pengelola BMN	Bagian Tata Usaha
		Jumlah barang persediaan pada aplikasi SAKTI tidak sesuai dengan jumlah fisik barang karena Input pada aplikasi SAKTI tidak dilakukan dengan tertib sehingga mengakibatkan Nilai persediaan pada aplikasi SAKTI tidak valid sehingga Laporan Keuangan tidak akuntabel	1. Melakukan input transaksi masuk dan keluar. 2. Melakukan stok opname setiap semester	Bagian Tata Usaha
		Gratifikasi petugas dalam memilih penyedia, gratifikasi petugas dalam membuat spesifikasi barang yang dibutuhkan dan penyusunan HPS yang disebabkan oleh Kurangnya integritas petugas sehingga mengakibatkan temuan audit	1. Penyedia dan pengelola pengadaan barang dan jasa menandatangani pakta integritas. 2. Menyusun HPS	PBJ & PPK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Inspektorat dan BPK dan reputasi instansi menjadi buruk		
		PPNPN tidak bisa diperpanjang lagi kontrak kerjanya karena terbitnya kebijakan pemerintah melalui UU dan turunannya terkait pengelolaan ASN sehingga mengakibatkan jumlah pegawai berkurang dan target Kinerja tidak tercapai	Melakukan perekrutan tenaga kontrak melalui Alih Daya untuk jabatan yang masuk dalam kriteria yang bisa dialihdayakan; Melakukan perekrutan PPPK	Bagian Tata Usaha
		Dokumen mutu Balai Besar POM di Banjarbaru yang terupdate sulit diakses oleh semua pegawai karena dokumen mutu hanya berupa hard copy, tidak dilakukan alih media, dan hanya ada di tempat tertentu sehingga Kinerja tidak optimal dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai SOP yang terupdate	Membuat subsite khusus QMS di Aplikasi Internal "Sibob" yang memuat seluruh dokumen QMS dan selalu diupdate jika terdapat perubahan dokumen, penerapan inovasi "INI SOP"	Pranata Komputer

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Tidak seluruh inovasi termonitoring dengan baik karena tidak adanya rekapitulasi inovasi yang masih aktif dilaksanakan dan tidak dilakukannya update PIC masing-masing inovasi sehingga mengakibatkan dampak inovasi kepada internal atau masyarakat tidak terukur/diketahui	Penyusunan rekapitulasi inovasi aktif dan mekanisme pelaporan monev di masing-masing SK inovasi	Tim Pembangunan ZI
		Dijatuhkannya hukuman disiplin kepada pegawai karena tidak adanya pengendalian hukuman disiplin dari internal unit kerja sehingga mengakibatkan penilaian RB yang tidak optimal dan Pembangunan ZI menjadi TMS	Pelaksanaan Inovasi GANANG PETANI & GANANG LAMBAT (Galuh Nanang Pegawai Teladan Bulan Ini & Galuh Nanang Lalai Absen, Melanggar dan Bolos, Aturan Terabaikan)	Pokja SDM

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.



Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

- 2) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
- 4) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan

pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan.

- 5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
- 6) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana,



- termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
 - 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
 - 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
 - 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
 - 6) Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
 - 7) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3. 1. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran



3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Banjarbaru

Arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Banjarbaru disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis (SWOT) yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di wilayah kerja. Penyesuaian ini dilakukan agar arah kebijakan unit tidak hanya selaras dengan strategi BPOM 2025–2029, tetapi juga responsif terhadap isu spesifik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru:

- 1) Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
- 6) Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
- 7) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan dan strategis BPOM tersebut, Balai Besar POM di Banjarbaru melakukan analisis SWOT sehingga diperoleh rumusan strategis sebagai berikut :

- 1) Peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan meningkatkan sinergitas keterlibatan stakeholder di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
- 2) Peningkatan pemanfaatan proses bisnis digital dalam memperluas jangkauan pengawasan pre market dan post market di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
- 3) Mewujudkan akselerasi digital dan perkembangan teknologi dalam upaya pengawasan pre market dan post market di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan olahan wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
- 4) Perkuatan pengembangan inovasi dan teknologi laboratorium Balai Besar POM di Banjarbaru dalam rangka pemastian mutu dan keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
- 5) Peningkatan efektivitas pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
- 6) Peningkatan efektivitas transformasi digital dan digitalisasi proses bisnis dalam pelayanan publik serta branding kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru
- 7) Optimalisasi kualitas pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan daya saing industri/produk sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri melalui peningkatan Pendampingan UMKM dalam pemenuhan Standar Kemanan dan mutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
- 8) Peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
- 9) Optimalisasi edukasi dan penanganan hoax Sediaan Farmasi dan Makanan melalui social media
- 10) Optimalisasi Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi Balai Besar POM di Banjarbaru



Tabel 3. 2. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Banjarbaru 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	4. Peningkatan pemanfaatan proses bisnis digital dalam memperluas jangkauan pengawasan pre market dan post market di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru 5. Mewujudkan akselerasi digital dan perkembangan teknologi dalam upaya pengawasan pre market dan post market di bidang Sedian Farmasi dan Pangan olahan wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	5. Peningkatan efektivitas pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahandi wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	7. Optimalisasi kualitas pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan daya saing industri/produk sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri melalui peningkatan Pendampingan UMKM dalam pemenuhan Standar Kemanana dan mutu di wilayah kerja Balaii Besar POM di Banjarbaru
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	8. Peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi di bidang sedian farmasi dan pangan olahan melalui pemberdayaan masyarakat

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru 9. Optimalisasi edukasi dan penanganan hoax Sediaan Farmasi dan Makanan melalui social media
	1. Peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan meningkatkan sinergitas keterlibatan stakeholder di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	6. Perkuatan pengembangan inovasi dan teknologi laboratorium Balai Besar POM di Banjarbaru dalam rangka pemastian mutu dan keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	6. Peningkatan efektivitas transformasi digital dan digitalisasi proses bisnis dalam pelayanan publik serta branding kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru 10. Optimalisasi Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi Balai Besar POM di Banjarbaru

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implemetasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Banjarbaru juga dilaksanakan secara responsive gender dan inklusi sosial.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Banjarbaru melaksanakan kegiatan prioritas sebagai berikut:.

I. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi BPOM, Balai Besar POM di Banjarbaru melaksanakan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan pre-market dan post-market terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan pre-market dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Balai Besar POM di Banjarbaru, sedangkan fungsi penyusunan standar tetap menjadi kewenangan pusat.

Selain fungsi pengawasan, Balai Besar POM di Banjarbaru juga melaksanakan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi dan kerja sama lintas sektor dengan instansi pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat jejaring kolaborasi, meningkatkan kesadaran publik, dan memperluas jangkauan efektivitas sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru.

Kegiatan ini mencakup Rincian Output (RO) sebagai berikut:

- 1) Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT, yang meliputi :
 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan; Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan;
 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan;
- 2) Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT:
 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi;
 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan public;

- 3) Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, meliputi :
 - Koordinasi lintas sektor dan
 - Intervensi keamanan PJAS;
- 4) Desa Pangan Aman, yang meliputi :
 - Perkuatan kapasitas desa;
 - Pemberdayaan komunitas desa;
 - Pengawasan keamanan pangan desa; dan Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya;
- 5) Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, yang meliputi :
 - Perkuatan lintas sektor;
 - Sosialisasi/ penyuluhan/ pelatihan /bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya;
 - Pemantauan dan evaluasi
- 6) Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE, yang meliputi :
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT;
- 7) Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM, yang meliputi :
 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail;
- 8) Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi:
 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
 - Pelaksanaan koordinasi;
- 9) Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT, yang meliputi :
 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat;
- 10) Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, yang meliputi
 - Peningkatan ruang lingkup pengujian;
 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium;



- 11) Penanganan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di Balai Besar POM di Banjarbaru , meliputi :
 - Operasi intelijen;
 - Gelar Kasus dan Pelaporan;
 - Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario;
 - Operasi penindakan;
 - Pemberkasan;
 - Pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (wasmalitrik);
- 12) Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans, yang meliputi :
 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans
- 13) UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT meliputi :
 - Advokasi dan Pendampingan UMKM;
- 14) Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT, meliputi :
 - Pengadaan sampel makanan;
 - Pengujian laboratorium sampel makanan;
- 15) Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar, yang meliputi :
 - Pengadaan sampel Makanan Bergizi Gratis;
 - Pengujian laboratorium sampel Makanan Bergizi Gratis;
- 16) Sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT, yang meliputi :
 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan;
 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan;
- 17) Sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa oleh UPT meliputi :
 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya;

- 18) Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT yang meliputi :
 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya;
- 19) Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang diperiksa oleh UPT, yang meliputi:
 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya;
 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana;
- 20) Pengadaan alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, yang meliputi :
 - Pengadaan dalam rangka pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium.
- 21) Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia, yang meliputi :
 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
- 22) Perangkat pengolah data dan komunikasi yang meliputi :
 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- 23) Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia yang meliputi :
 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan;

Seluruh Rincian Output tersebut menjadi bagian integral dari pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Besar POM di Banjarbaru dalam rangka menjamin mutu, keamanan, serta efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru.

II. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada upaya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja pegawai, serta pemeliharaan rutin sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Banjarbaru. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan sumber daya,



fasilitas kerja, dan lingkungan operasional yang optimal dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengelolaan BMN dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Di sisi lain, pengelolaan belanja pegawai dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan dan motivasi kerja pegawai, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, kegiatan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana dilakukan untuk menjaga ketersediaan fasilitas kerja yang layak, aman, dan berfungsi optimal, sehingga seluruh kegiatan teknis maupun administrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan bagian penting dari dukungan manajemen yang berperan langsung dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM.

Kegiatan ini mencakup Rincian Output (RO) sebagai berikut:

- 1) Layanan BMN, yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
- 2) Layanan Perkantoran, yang mencakup gaji pegawai, penyediaan dukungan operasional, pemeliharaan fasilitas, serta administrasi kepegawaian dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, Balai Besar POM di Banjarbaru untuk periode 2025-2029 menyusun Matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai Besar POM di Banjarbaru dalam memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi Sulawesi Utara. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Balai Besar POM di Banjarbaru, serta indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar POM di Banjarbaru selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai Besar POM di Banjarbaru, yaitu memastikan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.



Tabel 4. 1. Target Kinerja BBPOM di Banjarbaru Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94,25
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95

Sasaran Kegiatan		Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		6 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,3	91,5	91,8	92	92,3
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96	97	98	99
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	86	87	88	89
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,50	96,63	97,50	98,38	99,25



Sasaran Kegiatan		Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,6	91,8	93,2	94,6	96
		12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	71,5	75,5	79,2	80,9	82,4

Sasaran Kegiatan		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			Kemampuan Laboratorium					
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81,00	82,00	83,00	84,00
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71	71	86	86	86
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	88,06	88,94	89,81	90,68
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan	12	17	20	23	27

Sasaran Kegiatan		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			pembudayaan keamanan pangan					
		3	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,22	34,23	54,05	74,77	97,30
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	95,5	96	96,5	97

Sasaran Kegiatan		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,64	92,85	93	93,2	93,4
		3	Nilai AKIP UPT BPOM	82,03	82,18	82,28	82,3	82,33
		5	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		7	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	2,95	3	3,05	3,1



4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4. 2. Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Program

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11.241,28	12.365,41	13.601,95	14.962,14	16.458,36
Pengelolaan Sarana dan Prasarana	13.414,62	14.756,08	16.231,69	17.854,86	19.640,35
TOTAL	24.655,90	27.121,49	29.833,64	32.817,00	36.098,70

Tabel 4. 3. Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	23.081,82	25.468,71	28.098,22	30.994,81	34.185,40
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.574,08	1.652,78	1.735,42	1.822,19	1.913,30
TOTAL	24.655,90	27.121,49	29.833,64	32.817,00	36.098,70

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025–2029, menjadi turunan langsung dari Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Renstra Balai Besar POM di Banjarbaru ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, dan strategi yang selaras dengan Renstra BPOM serta memperhatikan karakteristik, potensi, dan tantangan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja menengah dan tahunan di lingkungan Balai Besar POM di Banjarbaru agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkesinambungan.

Untuk menjamin keterlaksanaan Renstra sesuai dengan target dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengambilan keputusan strategis.

Renstra Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman kerja bagi seluruh pegawai dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang semakin andal, transparan, dan akuntabel.



Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Balai Besar POM di Banjarbaru siap berkontribusi aktif dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang terlindungi dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan serta mendukung pencapaian visi BPOM menuju :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/ Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi / Fungsi Pelaksana
	2025	2026		2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
Balai Besar POM di Banjarbaru								24.655,90	27.121,49	29.833,64	32.817,00	36.098,70		
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								11.241,28	12.365,41	13.601,95	14.962,14	16.458,36		
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Banjarbaru	90	91	92	93	94,25						Pemeriksaan Pengujian
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BBPOM di Banjarbaru	26	27	28	29	30						Pemeriksaan
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Banjarbaru	91	92	93	94	95						Pemeriksaan Pengujian
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	BBPOM di Banjarbaru	100	100	100	100	100						Pemeriksaan Pengujian

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/ Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi / Fungsi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Banjarbaru	91	92	93	94	95						Pemeriksaan Pengujian
	6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	BBPOM di Banjarbaru	91,3	91,5	91,8	92	92,3						Pemeriksaan
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Banjarbaru	95	96	97	98	99						Pemeriksaan
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Banjarbaru	85	86	87	88	89						Pemeriksaan
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Banjarbaru	95,50	96,63	97,50	98,38	99,25						Pemeriksaan
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Banjarbaru	90	91	92	93	94						Pemeriksaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/ Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi / Fungsi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BBPOM di Banjarbaru	90,6	91,8	93,2	94,6	96						Pemeriksaan
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	BBPOM di Banjarbaru	91	92	93	94	95						Pemeriksaan
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BBPOM di Banjarbaru	100	100	100	100	100						Pemeriksaan
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Banjarbaru	71,5	75,5	79,2	80,9	82,4						Pengujian
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	BBPOM di Banjarbaru	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43						Pemeriksaan
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Banjarbaru	-	81,00	82,00	83,00	84,00						Pemeriksaan Pengujian
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		BBPOM di Banjarbaru	45	45	45	45	45						Pemeriksaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit
								(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi / Fungsi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	BBPOM di Banjarbaru	508	508	508	508	508						Pemeriksaan Pengujian
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	BBPOM di Banjarbaru	1067	1076	1133	1191	1253						Pemeriksaan Pengujian
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	BBPOM di Banjarbaru	55	56	61	65	71						Pemeriksaan
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	BBPOM di Banjarbaru	284	350	374	402	429						Pemeriksaan
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	BBPOM di Banjarbaru	204	204	204	216	216						Pemeriksaan
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	BBPOM di Banjarbaru	1	1	1	1	1						Tata Usaha
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Banjarbaru	1	1	1	1	1						Pengujian

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/ Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi / Fungsi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		BBPOM di Banjarbaru	1	1	1	1	1						Pengujian
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		BBPOM di Banjarbaru	417	417	417	417	417						Pemeriksaan Pengujian
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Banjarbaru	71	71	86	86	86						Pemeriksaan
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		BBPOM di Banjarbaru	5	5	6	6	6						Pemeriksaan
	Meningkatnya efektivitas KIE													
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BBPOM di Banjarbaru	87,19	88,06	88,94	89,81	90,68						Informasi dan Komunikasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/ Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi / Fungsi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	BBPOM di Banjarbaru	12	17	20	23	27						Informasi dan Komunikasi
	3	Jumlah desa pangan aman	BBPOM di Banjarbaru	4	7	7	7	7						Informasi dan Komunikasi
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	BBPOM di Banjarbaru	1	1	1	2	2						Informasi dan Komunikasi
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		BBPOM di Banjarbaru	363	200	240	288	386						Informasi dan Komunikasi
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		BBPOM di Banjarbaru	23	9	10	11	12						Informasi dan Komunikasi
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		BBPOM di Banjarbaru	12	17	20	23	27						Informasi dan Komunikasi
	RO 4: Desa Pangan Aman		BBPOM di Banjarbaru	4	7	7	7	7						Informasi dan Komunikasi
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		BBPOM di Banjarbaru	1	1	1	2	2						Informasi dan Komunikasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/ Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi / Fungsi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	BBPOM di Banjarbaru	16,22	34,23	54,05	74,77	97,30						Pemeriksaan
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		BBPOM di Banjarbaru	19	21	22	23	26						Pemeriksaan
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	BBPOM di Banjarbaru	95	95,5	96	96,5	97						Penindakan
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		BBPOM di Banjarbaru	5	5	5	5	5						Penindakan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/ Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi / Fungsi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	BBPOM di Banjarbaru	90	91	92	93	94						Penindakan
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		BBPOM di Banjarbaru	14	14	15	15	15						Penindakan
	Layanan Publik UPT yang prima													
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	BBPOM di Banjarbaru	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Tata Usaha Informasi dan Komunikasi
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		BBPOM di Banjarbaru	760	778	788	801	816						Tata Usaha Informasi dan Komunikasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/ Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi / Fungsi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	BBPOM di Banjarbaru	92,64	92,85	93	93,2	93,4						Seluruh Fungsi
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	BBPOM di Banjarbaru	82,03	82,18	82,28	82,3	82,33						Seluruh Fungsi
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	BBPOM di Banjarbaru	5	5	5	5	5						Tata Usaha
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	BBPOM di Banjarbaru	2,9	2,95	3	3,05	3,1						Seluruh Fungsi
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		BBPOM di Banjarbaru	1	1	1	1	1						Tata Usaha
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		BBPOM di Banjarbaru	1	1	1	1	1						Tata Usaha
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		BBPOM di Banjarbaru	1	1	1	1	1						Tata Usaha

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit
								(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi / Fungsi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								13.414,62	14.756,08	16.231,69	17.854,86	19.640,35	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Banjarbaru	1	1	1	1	1						Tata Usaha
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Banjarbaru	1	1	1	1	1						Tata Usaha

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANJARBARU



ARY YUSTANTININGSIH